

**PENGARUH PERTUMBUHAN EKONOMI, PENDAPATAN
ASLI DAERAH DAN DANA PERIMBANGAN TERHADAP
PENGALOKASIAN ANGGARAN BELANJA MODAL
DI JAWA TENGAH**

**(Studi Empiris pada Pemerintah Kabupaten/Kota
di Jawa Tengah Tahun 2008-2010)**



SKRIPSI

**Karya Tulis sebagai salah satu syarat
untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi**

Jurusan Akuntansi

Disusun Oleh :

ACHMAD ASRORRI

NIM : 1A.08.1340

SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI

BANK BPD JATENG

SEMARANG

2012

HALAMAN PERSETUJUAN

**PENGARUH PERTUMBUHAN EKONOMI, PENDAPATAN
ASLI DAERAH DAN DANA PERIMBANGAN TERHADAP
PENGALOKASIAN ANGGARAN BELANJA MODAL DI JAWA
TENGAH**

**(Studi Empiris pada Pemerintah Kabupaten/Kota di
Jawa Tengah Tahun 2008-2010)**

Disusun oleh :

ACHMAD ASRORRI

NIM : 1A.08.1340

**Disetujui untuk dipertahankan dihadapan Tim Penguji Skripsi
STIE Bank BPD Jateng**

Semarang, Oktober 2012

Pembimbing I

Pembimbing II

Mekani Vestari, SE, Msi, Akt

NIDN: 0016077401

Yohana Kus Suparwati, SE, Msi

NIDN: 0611056902

HALAMAN PENGESAHAN

**PENGARUH PERTUMBUHAN EKONOMI, PENDAPATAN
ASLI DAERAH DAN DANA PERIMBANGAN TERHADAP
PENGALOKASIAN ANGGARAN BELANJA MODAL
(Studi Empiris pada Pemerintah Kabupaten/Kota di
Jawa Tengah Tahun 2008-2010)**

Disusun Oleh :
ACHMAD ASRORRI
NIM : 1A.08.1340

Dinyatakan diterima dan disetujui oleh Tim Penguji Skripsi STIE Bank BPD
Jateng pada tanggal 6 November 2012

TIM PENGUJI

TANDA TANGAN

1. Nur Anissa, SE, Msi, Akt
NIDN : 0604037302

.....

2. Suhana, SS, MM
NIDN : 0601107001

.....

3. Mekani Vestari, SE, Msi, Akt
NIDN : 0016077401

.....

Mengesahkan,
Ketua STIE Bank BPD Jateng

DR. H. Djoko Sudantoko, SSos, MM
NIDN. 0607084501

ABSTRAK

Pelaksanaan desentralisasi fiskal membawa banyak keuntungan bagi Pemerintah Daerah untuk mengelola keuangannya sendiri. Tujuan dari desentralisasi fiskal adalah untuk menjadikan Pemerintah Daerah lebih dekat dengan rakyatnya, sehingga pelayanan pemerintah dapat dilakukan dengan efisien dan efektif. Hal ini berdasarkan asumsi bahwa Pemerintah Daerah memiliki pemahaman yang lebih baik mengenai kebutuhan dan aspirasi masyarakat mereka daripada Pemerintah Pusat. Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh Pertumbuhan Ekonomi (PE), Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan Dana Perimbangan (DP) terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal (BM). Sampel yang digunakan di dalam penelitian ini adalah 35 Pemerintahan Kabupaten/Kota di Jawa Tengah yang diambil menggunakan metode *purposive sampling*. Alat analisis yang digunakan adalah uji regresi berganda. Hasil pengujian menunjukkan bahwa Pertumbuhan Ekonomi (PE), Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan Dana Perimbangan (DP) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal (BM).

Kata Kunci : APBD, Pertumbuhan Ekonomi, PAD, DP, BM

ABSTRACT

Fiscal decentralization brings many benefits for local government to manage its own finances. The objective of fiscal decentralization is to make local government closer to their citizen, so that government's services can be done efficiently and effectively. It is based on the assumption that local government has a better understanding of the needs and aspirations of their citizen rather than central government. This study aimed to examine the effect of Economic growth (PE), Local Revenue (PAD), and Fund Balance (DP) for Capital Expenditure (BM). The sample that used in this study were 35 government 's districts / municipalities in central java were taken using purposive sampling method. The analysis tool used is multiple regression test. The test result showed that the Economic Growth (PE), Local Revenue (PAD), and Fund Balance (DP) have a significant effect for Capital Expenditure (BM).

Keywords: APBD, Economic Growth (PE), Local Revenue (PAD), Fund Balance (DP), Capital Expenditure (BM)

SURAT PERNYATAAN

Yang bertandatangan di bawah ini adalah saya,

Nama : Achmad Asrorri

NIM : 1A.08.1340

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi dengan judul

“PENGARUH PERTUMBUHAN EKONOMI, PENDAPATAN ASLI DAERAH, DAN DANA PERIMBANGAN TERHADAP PENGALOKASIAN ANGGARAN BELANJA MODAL (Studi Empiris pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah Tahun 2008-2010)”

telah saya susun dengan sebenar-benarnya dengan memperhatikan kaidah akademik dan menjunjung tinggi hak atas karya ilmiah.

Apabila di kemudian hari ditemukan adanya unsur plagiasi maupun unsur kecurangan lainnya pada skripsi yang telah saya buat tersebut, maka saya bersedia mempertanggungjawabkannya dan saya siap menerima segala konsekuensi yang ditimbulkannya termasuk pencabutan gelar kesarjanaan yang telah diberikan kepada saya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan rasa tanggung jawab.

Semarang, 1 Oktober 2012

Tdd



Achmad asrorri

MOTTO

✓ *“Sukses adalah anak kandung keberanian”*

–Benjamin Disraeli–

✓ *“Kita membiayai hidup dengan apa yang kita dapatkan, tetapi kita menciptakan hidup dengan apa yang kita berikan”*

–Winston Churchill–

✓ *“Hidup adalah tentang hasil-hasil. Anda akan selalu menuai hasil-hasil terbesar ketika Anda menjadi bertanggung jawab penuh. Hanya ketika Anda menjadi bertanggung jawab untuk segala sesuatu dalam hidup, Anda bisa bertanggung jawab untuk mengubah apapun. Segala sesuatu adalah tanggung jawab Anda, bukan merupakan kesalahan Anda”*

–James Arthur Ray–

KARYA ILMIAH INI KUPERSEMBAHAN UNTUK :

➤ **Bapak dan Ibu tercinta**

Saya janji akan membuat kalian selalu bahagia dan bangga

“Ya Allah lindungilah orang tuaku, semoga aku dapat menjadi seseorang yang mereka cita-citakan”

➤ **Teman Teman ku Semua**

Saya akan membalas kebaikan kalian semua, terima kasih atas dukungannya

➤ **Almamaterku STIE Bank BPD Jateng**

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya pada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi hingga akhir dengan judul : “Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal”.

Maksud dari penyusunan skripsi ini untuk memenuhi salah satu syarat dalam menyelesaikan gelar sarjana Program Strata 1 (S1) pada STIE Bank BPD Jateng Semarang.

Tak lupa penulis mengucapkan banyak-banyak terima kasih karena telah banyak mendapatkan bantuan dari berbagai pihak, hingga selesainya pembuatan skripsi. Dalam kesempatan ini, penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Dr. H. Djoko Sudantoko, S.Sos, MM. selaku Ketua STIE Bank BPD Jateng Semarang.
2. Ibu Nur Anissa, SE, MSi, Akt. selaku Ketua Jurusan Akuntansi.
3. Ibu Mekani Vestari, SE, Msi, Akt. selaku Dosen Pembimbing I yang telah memberikan bimbingan kepada penulis dengan meluangkan waktu, tenaga dan dengan penuh kesabaran membimbing dan mengarahkan penulis hingga skripsi ini selesai.
4. Ibu Yohana Kus Suparwati, Se, Msi. selaku Dosen Pembimbing II yang telah membantu memberikan kritik, saran hingga akhir penyusunan skripsi ini.
5. Bapak Suhana , SS, MM. selaku dosen wali yang telah banyak memberikan arahan dan petunjuk untuk segera menyelesaikan studi kuliah ini
6. Segenap Dosen Pengajar STIE Bank BPD Jateng Semarang yang telah banyak memberikan ilmu dan pelajaran berharga.
7. Bapak dan Ibu tercinta yang selalu memberikan motivasi, semangat, dorongan dan doa hingga skripsi ini selesai.
8. Adik-adik ku dan segenap keluarga yang juga selalu memberikan motivasi, semangat, dorongan dan doa hingga skripsi ini selesai.

9. Sohib-sohibku Ridwan Eko,Septian,Deni Irawan, Lilis, Agus, Ulin ,Ahmad Rizkiawan, Ian, Yudhi, Pur, Nunik, Wawan, Cuik, dan masih banyak lagi . *I will always remember you all.*
10. Vico Dimas Wicaksono yang selalu meberikan semangat selama pengerjaan skripsi ini.
11. Girls Generation yang selalu menyemangatiku, memberikan inspirasi ketika aku melihat video clips nya.
12. Kawan-kawan seperjuanganku saat bimbingan skripsi di Bu Mekani dan Bu Yo.Danar,Sasa,Ika,Yudhi,Pur,Zali,Dewi S, Amur, Arif, Ian, Rico, Nayli, Indra,Burhan. Terima kasih atas dukungan dan semangatnya. Satu kata : Kita pasti bisa.
13. Teman-teman Akuntansi angkatan 2008 yang telah membantu dan memberikan masukannya selama ini.
14. Anak-anak penghuni rumah hantu. Yudhi,Pursidi,Kang Abu Haniva , Dani , Ari, Danang Mereka Semua adalah teman teman yang baik dan selalu memberikan support di dalam pengerjaan skripsi ini.
15. Serta semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu per satu.

Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi siapa saja yang membutuhkan, dan dapat memberikan ilmu yang berharga. Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, segala saran dan kritik yang bersifat membangun sangat penulis harapkan agar kelak dikemudian hari dapat menghasilkan karya yang lebih baik.

Semarang, 1 Okotober 2012

Penulis,

Achmad Asrorri

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
ABSTRAK	iv
ABSTRACT	v
SURAT PERNYATAAN	vi
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR GAMBAR	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Perumusan Masalah	10
1.3. Tujuan Penelitian	11
1.4. Kegunaan Penelitian	11
1.4.1. Kegunaan Teoritis	11
1.4.2. Kegunaan Praktis	11
1.5. Kerangka Penelitian	12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	13
2.1. Tinjauan Pustaka	13
2.1.1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).....	13

2.1.2. Anggaran Daerah Sektor Publik	17
2.1.3. Desentralisasi Fiskaldi Indonesia.....	18
2.1.4. Pertumbuhan Ekonomi.....	21
2.1.5. Pendapatan Asli Daerah.....	24
2.1.6. Dana Perimbangan	27
2.1.6.1 Dana Bagi Hasil	28
2.1.6.2 Dana Alokasi Umum.....	29
2.1.6.3 Dana Alokasi Khusus.....	30
2.1.6.4 Pinjaman Daerah.....	32
2.1.6.5 Lain-lain Pendapatan.....	32
2.1.7. Belanja Modal.....	32
2.1.8. Pentingnya Anggaran Sektor Publik dan Kelemahan Anggaran.....	35
2.2. Pengembangan Hipotesis	36
2.2.1. Hubungan Perumbuhan Ekonomi terhadap Belanja Modal.....	36
2.2.2. Hubungan Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Modal	38
2.2.3. Hubungan Dana Perimbangan terhadap Belanja Modal ..	39
2.3. Model Penelitian	40
BAB III METODE PENELITIAN	41
3.1. Definisi Konsep	41
3.2. Definisi Operasional	42
3.3. Populasi dan Sampel	42
3.4. Metode Pengumpulan Data.....	44
3.5. Metode Analisis Data.....	44
3.5.1. Statistik Deskriptif	44
3.5.2. Analisis Regresi Berganda	44
3.5.3. Uji Asumsi Klasik	45
3.5.4. Pengujian Hipotesis.....	47

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	49
4.1. Gambaran Umum Objek Penelitian	49
4.1.1. Sampel Penelitian.....	49
4.2. Statistik Deskriptif	51
4.2.1. Belanja Modal	51
4.2.2. Pendapatan Asli Daerah	51
4.2.3. Dana Perimbangan	52
4.2.4. PDRB	53
4.3. Hasil Analisis.....	55
4.3.1. Uji Asumsi Klasik	55
4.3.1.1. Uji Normalitas.....	55
4.3.1.2. Uji Multikolinieritas.....	55
4.3.1.3. Uji Heteroskedastisitas.....	56
4.3.2. Analisis regresi berganda	57
4.3.3. Uji Model	58
4.3.4. Koefisien Determinasi	58
4.3.5. Pengujian Hipotesis.....	59
4.4. Pembahasan.....	60
BAB V PENUTUP.....	64
5.1. Kesimpulan	64
5.2. Keterbatasan.....	64
5.3. Saran.....	65
5.4. Implikasi Manajerial	65

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN – LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 4.1	Kriteria Sampel 49
Tabel 4.2	Kabupaten dan Kota Sampel 50
Tabel 4.3	Tabel Satatistik Deskriptif..... 51
Tabel 4.4	Hasil Uji Kolmogorov Smirnov 55
Tabel 4.5	Hasil Uji Multikolinieritas 56
Tabel 4.6	Hasil Uji Heterokedastisitas 56
Tabel 4.7	Model Regresi 57
Tabel 4.8	Tabel Pengujian Pengaruh PDRB terhadap Belanja Modal..... 59
Tabel 4.9	Tabel Pengujian Pengaruh PAD terhadap Belanja Modal..... 59
Tabel 4.10	Tabel Pengujian Pengaruh Dana Perimbangan terhadap Belanja Modal 60

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1.1 Kerangka Penelitian	12
Gambar 4.1 Pola Hubungan PAD dengan Belanja Modal.....	52
Gambar 4.2 Pola Hubungan Dana Perimbangan dengan Belanja Modal	53
Gambar 4.3 Pola Hubungan PDRB dengan Belanja Modal	54

STIE BPD Jateng

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1. Data Variabel PE Pemerintah Daerah (Dalam Persentase)
- Lampiran 2. Data Variabel PE Pemerintah Daerah (Dalam Rupiah)
- Lampiran 3. Data Variabel PAD Pemerintah Daerah (Dalam Rupiah)
- Lampiran 4. Data Variabel DP Pemerintah Daerah (Dalam Rupiah)
- Lampiran 5. Data Variabel DAU Pemerintah Daerah (Dalam Rupiah)
- Lampiran 6. Data Variabel DAK Pemerintah Daerah (Dalam Rupiah)
- Lampiran 7. Data Variabel DBH Pemerinatah Daerah (Dalam Rupiah)
- Lampiran 8. Data Variabel BM Pemerintah Daerah (Dalam Rupiah)
- Lampiran 9. Data Mentah (*Raw Data*) Penelitian
- Lampiran10. Output

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kebijakan desentralisasi merupakan suatu kebijakan untuk mewujudkan kemandirian daerah. Kebijakan desentralisasi telah menjadi pilihan baik di negara maju maupun negara berkembang dalam menjalankan kebijakan ekonominya, tidak terkecuali di Indonesia. Sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 tentang pemerintah daerah yang disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 (UU 32/2004) dan Undang-Undang Nomor 25 tahun 1999 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah yang disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 (UU 33/2004), maka paradigma penyelenggaraan pemerintahan mengalami pergeseran. Implikasinya terhadap pemerintah daerah adalah bahwa pemerintah daerah diberikan kewenangan yang lebih besar untuk mengatur dan mengurus daerahnya sendiri termasuk dalam hal pengelolaan keuangan daerah. Hal ini sangat berpengaruh terhadap pesatnya pembangunan daerah.

Tujuan pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal antara lain adalah untuk lebih mendekatkan pelayanan pemerintah kepada masyarakat, memudahkan masyarakat untuk memantau dan mengontrol penggunaan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), selain untuk menciptakan persaingan yang sehat antar daerah dan mendorong timbulnya inovasi. Sejalan dengan kewenangan tersebut, Pemerintah Daerah diharapkan lebih mampu menggali sumber-sumber keuangan khususnya untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan pemerintahan dan pembangunan di daerahnya melalui PAD.

Pesatnya pembangunan daerah yang menyangkut perkembangan kegiatan fiskal yang membutuhkan alokasi dana dari pemerintah daerah mengakibatkan pembiayaan pada pos belanja yang terdiri dari belanja rutin dan belanja pembangunan membutuhkan tersedianya dana yang besar pula untuk membiayai kegiatan tersebut. Belanja (pengeluaran) pemerintah daerah yang oleh pemerintah

daerah dilaporkan dalam APBD merupakan kegiatan rutin pengeluaran kas daerah untuk membiayai kegiatan-kegiatan operasi dalam pemerintahan. Dengan belanja yang semakin meningkat maka dibutuhkan dana yang besar pula agar belanja untuk kebutuhan pemerintah daerah dapat terpenuhi. Dengan terpenuhinya kebutuhan belanja pemerintah, maka diharapkan pelayanan terhadap masyarakat menjadi lebih baik dan kesejahteraan masyarakat menjadi meningkat.

Berkaitan dengan hal tersebut, lingkup anggaran menjadi relevan dan penting di lingkungan pemerintah daerah. Hal ini terkait dengan dampak anggaran terhadap kinerja pemerintah, sehubungan dengan fungsi pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Selanjutnya, DPRD akan mengawasi kinerja pemerintah melalui anggaran. Bentuk pengawasan ini sesuai dengan *agency theory* yang mana pemerintah daerah sebagai agen dan DPRD sebagai prinsipal. Hal ini menyebabkan penelitian di bidang anggaran pada pemerintah daerah menjadi relevan dan penting.

Mardiasmo (2005: 63) menyatakan terdapat beberapa alasan pentingnya anggaran sektor publik yaitu: (a) Anggaran merupakan alat bagi pemerintah untuk mengarahkan pembangunan sosial-ekonomi, menjamin kesinambungan, dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat, (b) Anggaran diperlukan karena adanya masalah keterbatasan sumber daya (*scarcity of resources*), pilihan (*choise*) dan *trade offs*. (c) Anggaran diperlukan untuk meyakinkan bahwa pemerintah telah bertanggung jawab terhadap rakyat. Dalam hal ini anggaran publik merupakan instrumen pelaksanaan akuntabilitas publik oleh lembaga-lembaga publik yang ada.

Dalam struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah mencakup dua bagian penting yaitu anggaran pendapatan daerah dan anggaran belanja daerah. Belanja daerah merupakan pengalokasian dana yang harus dilakukan secara efektif dan efisien, dimana belanja daerah dapat menjadi tolok ukur keberhasilan pelaksanaan kewenangan daerah. Apalagi dengan adanya otonomi daerah pemerintah dituntut untuk mengelola keuangan daerah secara baik dan efektif. Belanja daerah merupakan belanja pemerintah daerah yang manfaatnya melebihi satu anggaran dan akan menambah aset atau kekayaan daerah dan selanjutnya

akan menambah belanja yang bersifat rutin seperti biaya pemeliharaan pada kelompok Belanja Administrasi Umum. Kelompok belanja ini mencakup Jenis Belanja baik untuk bagian Belanja Aparatur Daerah maupun Pelayanan Publik.

Dalam konteks pengelolaan keuangan daerah, anggaran belanja modal sangat berkaitan dengan perencanaan keuangan jangka panjang, terutama pembiayaan untuk pemeliharaan aset tetap yang dihasilkan dari belanja modal tersebut. Konsep *Multi-Term Expenditure Framework* (MTEF) menyatakan bahwa kebijakan belanja modal harus memperhatikan kemanfaatan (*usefulness*) dan kemampuan keuangan pemerintah daerah (*budget capability*) dalam pengelolaan aset tersebut dalam jangka panjang (Allen dan Tommasi, 2001). Sesuai aturan APBD dan tujuan otonomi daerah, bahwa hakikat Anggaran Daerah adalah merupakan alat untuk meningkatkan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat, maka APBD harus benar-benar menggambarkan perangkaan ekonomis yang mencerminkan kebutuhan masyarakat untuk memecahkan masalahnya dan meningkatkan kesejahteraannya.

Peningkatan alokasi belanja modal dalam bentuk aset tetap seperti infrastruktur, peralatan dan infrastruktur sangat penting untuk meningkatkan produktivitas perekonomian karena semakin tinggi belanja modal semakin tinggi pula produktivitas perekonomian. Saragih (2003) menyatakan bahwa pemanfaatan belanja hendaknya dialokasikan untuk hal-hal yang produktif seperti untuk melakukan aktivitas pembangunan. Sejalan dengan pendapat tersebut, Stine (1994) dalam Darwanto dan Yustikasari (2007) menyatakan bahwa penerimaan pemerintah hendaknya lebih banyak untuk program-program pelayanan publik. Kedua pendapat ini menyiratkan pentingnya mengalokasikan belanja untuk berbagai kepentingan publik.

Pada pasal 26 PP No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah bagian keempat tentang Belanja Daerah ayat 1 berbunyi “Belanja Daerah digunakan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan propinsi atau kabupaten/kota yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan yang ditetapkan dengan ketentuan perundang-undangan”. Selanjutnya di ayat 2 disebutkan bahwa “Belanja penyelenggaraan urusan wajib

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan untuk melindungi masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial, dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial”, tetapi dalam praktiknya dalam penyusunan anggaran, usulan yang diajukan oleh eksekutif memiliki muatan mengutamakan kepentingan eksekutif (Smith dan Bertozzi, 1998). Eksekutif mengajukan anggaran yang dapat memperbesar *agency*-nya, baik dari segi finansial maupun nonfinansial. Sementara Keefer dan Khemani, 2003; Mauro, 1998; Von Hagen, 2002, secara implisit menyatakan bahwa anggaran juga digunakan oleh legislatif untuk memenuhi *self-interestnya*. Hal ini berarti banyak anggaran belanja daerah tidak digunakan untuk belanja modal melainkan untuk belanja yang lainnya.

Badan Perencana Pembangunan Nasional (Bappenas) menyatakan sekitar 70 sampai 80 persen belanja daerah dihabiskan untuk belanja rutin yakni gaji Pegawai Negeri Sipil (PNS) di daerah. Sementara untuk belanja modal kapasitasnya masih kurang dan harus lebih ditingkatkan. Hal ini diungkapkan Deputi Bidang Pengembangan Regional dan Otonomi Daerah Bappenas Max Hasudungan Pohan (Runiarasi, 2011). Menurutnya, belum ada daerah yang memiliki komposisi anggaran yang mencerminkan pembangunan daerah. Dia menyatakan, idealnya anggaran daerah 70 persen digunakan untuk pembangunan, dan 30% sisanya untuk belanja rutin dan pegawai.

Di Jawa Tengah Belanja daerah dalam APBD Perubahan 2011 masih didominasi belanja pegawai yang mencapai 70,59 %. Sedangkan belanja langsung untuk kepentingan publik hanya 29,41 %. Demikian disampaikan Ketua DPRD Asip Kholbihi terkait komposisi APBD Perubahan 2011 yang telah ditetapkan DPRD (Burhan, 2011). Komposisi itu kata dia, masih belum ideal karena kesenjangannya antara belanja tidak langsung yang didominasi kepentingan aparatur jauh lebih tinggi dari belanja langsung. Hal ini membuat pemerintah daerah sulit untuk melaksanakan pembangunan karena kurangnya dana untuk membiayai pembangunan infrastruktur yang dibutuhkan oleh masyarakat.

Pertumbuhan ekonomi adalah proses kenaikan *output* per kapita. Secara tradisional, pertumbuhan ekonomi ditujukan untuk peningkatan yang berkelanjutan Produk Domestik Regional Daerah/PDRB (Saragih, 2003). Ukuran yang paling penting dalam konsep ekonomi adalah produk domestik bruto (PDB) yang mengukur total nilai barang dan jasa yang dihasilkan pada suatu negara atau nasional dan PDRB untuk mengukur total nilai barang dan jasa yang dihasilkan pada suatu daerah atau lokal. PDB digunakan untuk banyak tujuan tetapi yang paling penting adalah untuk mengukur ke seluruh performa dari suatu perekonomian.

Hasil penelitian yang dilakukan Lin & Liu (2000) menunjukkan desentralisasi memberikan dampak yang sangat berarti bagi pertumbuhan ekonomi daerah. Oates (1995), Lin dan Liu (2000) yang membuktikan adanya hubungan yang positif dan signifikan antara desentralisasi fiskal dengan pertumbuhan ekonomi. Hasil ini mendukung sintesa yang menyatakan bahwa, pemberian otonomi yang lebih besar akan memberikan dampak yang lebih besar bagi pertumbuhan ekonomi, hal inilah yang mendorong pemerintah daerah untuk mengalokasikan secara lebih efisien berbagai potensi lokal untuk kepentingan pelayanan publik (Lin dan Liu, 2000; Mardiasmo, 2002; Wong, 2004).

Peran pemerintah sangat penting dalam pembangunan daerah. Hal ini dapat dilihat dari sejumlah faktor yang mempengaruhi pembangunan daerah yang harus ditangani oleh pemerintah. Faktor-faktor tersebut adalah sumber daya alam, tenaga kerja, investasi modal, kewirausahaan, transportasi, komunikasi, komposisi sektor industri, teknologi, pasar ekspor, situasi perekonomian internasional, kapasitas pemerintah daerah, pengeluaran pemerintah dan dukungan pembangunan. Berdasarkan uraian tersebut disimpulkan semakin tinggi tingkat pertumbuhan perekonomian tentu akan mengakibatkan bertumbuhnya investasi modal swasta maupun pemerintah. Hal inilah yang mengakibatkan pemerintah lebih leluasa dalam menyusun anggaran belanja modal.

Secara nasional pertumbuhan ekonomi di Indonesia selama tahun 2006 – 2009 memiliki tren kenaikan. Kondisi yang sama juga terjadi di Jawa Tengah, pertumbuhan ekonomi yang terjadi di Jawa Tengah pada tahun 2006 – 2009 rata-

rata pertumbuhan ekonomi adalah sebesar 0,55%; 0,01% dan 0,11% (BPS, 2010). Hal ini berarti terjadi peningkatan dalam perekonomian. Dengan demikian seharusnya pemerintah daerah mampu mengelola pertumbuhan perekonomian di Jawa Tengah dengan mengalokasikannya pada belanja modal sehingga terjadi pemerataan dan peningkatan pembangunan di segala bidang. Namun kenyataan menunjukkan bahwa banyak dana dianggarkan bukan untuk kepentingan publik.

Berdasarkan Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, salah satu sumber pendapatan daerah adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang terdiri dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah. Peningkatan PAD diharapkan meningkatkan investasi belanja modal pemerintah daerah sehingga kualitas pelayanan publik semakin baik. Fenomena yang terjadi adalah peningkatan pendapatan asli daerah tidak diikuti dengan kenaikan anggaran belanja modal yang signifikan hal ini disebabkan karena pendapatan asli daerah tersebut banyak tersedot untuk membiayai belanja lainnya.

Berlakunya Undang-undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah, membawa perubahan mendasar pada sistem dan mekanisme pengelolaan pemerintahan daerah. UU ini menegaskan bahwa untuk pelaksanaan kewenangan Pemda (Pemerintah Daerah), Pempus (Pemerintah Pusat) akan mentransferkan dana perimbangan kepada Pemda. Dana Perimbangan tersebut terdiri dari Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan bagian daerah dari bagi hasil pajak pusat.

Dana Alokasi Umum (DAU) pengalokasiannya menekankan aspek pemerataan dan keadilan yang selaras dengan penyelenggaraan urusan pemerintahan (UU 32/2004). Dengan adanya transfer dana dari pusat ini diharapkan pemerintah daerah bisa lebih mengalokasikan PAD yang diperolehnya untuk membiayai belanja modal di daerahnya.

Dana transfer dari pemerintah pusat ke Pemerintah Daerah selain DAU adalah Dana Alokasi Khusus (DAK) yaitu dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan

prioritas nasional (UU 33/2004). DAK ini penggunaannya diatur oleh Pemerintah Pusat dan hanya digunakan untuk kegiatan pendidikan, kesehatan, keluarga berencana, infrastruktur jalan dan jembatan, infrastruktur irigasi, infrastruktur air minum dan sanitasi, prasarana pemerintah daerah, lingkungan hidup, kehutanan, sarana prasarana pedesaan, perdagangan, pertanian serta perikanan dan kelautan yang semuanya itu termasuk dalam komponen belanja modal dan Pemerintah Daerah diwajibkan untuk mengalokasikan dana pendamping sebesar 10% dari nilai DAK yang diterimanya untuk mendanai kegiatan fisik. Disamping itu, Pemerintah Daerah juga memiliki sumber pendanaan sendiri berupa PAD, pinjaman daerah, maupun lain-lain penerimaan daerah yang sah. Kebijakan penggunaan semua dana tersebut diserahkan kepada Pemda.

Pada praktiknya, transfer dari Pemerintah pusat merupakan sumber pendanaan utama Pemerintah daerah untuk membiayai operasi utamanya sehari-hari, yang oleh Pemda “dilaporkan” di perhitungan APBD. Tujuan dari transfer ini adalah untuk mengurangi (kalau tidak mungkin menghilangkan) kesenjangan fiskal antar pemerintah dan menjamin tercapainya standar pelayanan publik minimum di seluruh negeri.

Penelitian tentang anggaran di pemerintah khususnya tentang pertumbuhan ekonomi, dana perimbangan (DAU dan DAK), belanja daerah dan pendapatan asli daerah telah banyak dilakukan, misalnya Darwanto dan Yulia Yustikasari (2007) melakukan penelitian yang berjudul Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum Terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal. Variabel yang digunakan adalah Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Anggaran Belanja Modal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel pertumbuhan ekonomi (PDRB) tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel belanja modal sedangkan variabel PAD dan DAU memiliki pengaruh positif dan signifikan.

Peneliti lain, Anggiat Situngkir dan John Sihar Manurung (2009) dalam penelitiannya yang berjudul Efek Memiliki Pendapatan Daerah, Pengalokasian Dana Umum dan Dana Khusus Pada Belanja Modal Di Kota Dan Kabupaten Sumatera Utara. Variabel yang digunakan adalah Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Anggaran Belanja Modal. Hasil

penelitian menunjukkan bahwa terdapat pengaruh positif yang signifikan PAD, DAU dan DAK terhadap anggaran belanja modal .

Nugroho Suratno Putro (2010) melakukan penelitian yang berjudul Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal (Study Kasus Pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah). Variabel yang digunakan adalah Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Anggaran Belanja Modal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi dan pendapatan asli daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap anggaran belanja modal, sedangkan DAU berpengaruh signifikan. Model penelitian mendapatkan nilai adjusted R^2 sebesar 0,430 atau 43,0%. Nilai R^2 yang relatif rendah memungkinkan perlu adanya penyempurnaan atau pengembangan model tersebut.

Subowo dan Endar Rosita Wati (2010) dalam penelitiannya yang berjudul Hubungan antara PAD dan Dana Perimbangan dengan Belanja Modal Pemda Kudus. Variabel yang digunakan yaitu Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan (tersusun dari Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Bagi Hasil Daerah) dan Belanja Modal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat hubungan positif yang signifikan pendapatan asli daerah dengan belanja modal maupun hubungan positif antara dana perimbangan dengan belanja modal.

Farah Marta Yovita dan Dwi Cahyo Utomo (2011) meneliti mengenai pengaruh pertumbuhan ekonomi, PAD dan DAU terhadap pengalokasian anggaran belanja modal pada pemerintah provinsi se Indonesia tahun 2008 – 2010 mendapatkan bahwa pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif terhadap alokasi belanja modal, sebaiknya DAU justru berpengaruh negative terhadap alokasi belanja modal, sedangkan PAD tidak berpengaruh signifikan.

Hasil penelitian tersebut menunjukkan ada gap yang terjadi pada penelitian terdahulu sehingga diperlukan sebuah penelitian untuk mengetahui bagaimana sebenarnya pengaruh yang ada di antara variabel penelitian. Selain itu nilai koefisien determinasi dari masing-masing penelitian menunjukkan kisaran nilai yang cukup jauh antar penelitian satu dengan penelitian lainnya. Kondisi tersebut mencerminkan bahwa periode penelitian, pemilihan lokasi wilayah dan variabel

penelitian yang diteliti dapat memberikan variasi hasil yang berbeda.

Penelitian ini mengacu pada penelitian Nugroho Suratno Putro (2010) dengan menggunakan variabel-variabel yang sama sebagaimana digunakan dalam penelitian-penelitian sebelumnya. Pengembangan model penelitian Nugroho dan Suratno Putro (2010) dikembangkan pada penelitian ini untuk menguji apakah nilai koefisien determinasinya lebih tinggi dari penelitian sebelumnya. Selain itu penelitian ini juga mendasarkan pada adanya *gap* yang terjadi antara beberapa hasil penelitian anggaran di pemerintah dan fenomena yang telah ada, maka penelitian mengenai Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan terhadap Belanja Daerah di Jawa Tengah masih cukup relevan untuk dilakukan.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu yaitu penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian terdahulu dengan menggabungkan beberapa variabel yang berbeda dari peneliti terdahulu sehingga jumlah variabel penelitian menjadi 4 yaitu 3 variabel *independent* yang terdiri dari pertumbuhan ekonomi, pendapatan asli daerah, dana perimbangan, dan satu variabel *dependent* yaitu pengalokasian anggaran belanja modal. Selain itu juga ada perbedaan pada data dana perimbangan. Dana perimbangan pada penelitian terdahulu dipisah antara data DAU dan DAK sebagai dua variabel sedangkan pada penelitian ini digabung menjadi satu dengan nama dana perimbangan yang merupakan jumlah DAU, DAK dan dana bagi hasil. Hal ini karena baik DAU, DAK dan dana bagi hasil adalah merupakan dana dari pemerintah pusat dan sekaligus sebagai factor di luar pendapatan asli daerah. Penggabungan ketiganya menjadi satu ukuran variabel didasarkan pada bentuk dana yang sama yang berasal dari pemerintah pusat sesuai yang tertera pada Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 (UU 33/2004) sehingga secara umum tidak menghilangkan konsep sumber dana tersebut jika variabel tersebut digabung.

Objek penelitian yang dipilih adalah di Jawa Tengah. Hal ini karena pertimbangan bahwa wilayah Jawa Tengah adalah wilayah yang berada dekat dengan pusat pemerintahan pusat sehingga pengawasan terhadap alokasi dana perimbangan dari pemerintah pusat relatif mudah dilakukan. Selain itu propinsi

Jawa Tengah adalah propinsi yang relatif masih menunjukkan pertumbuhan ekonomi yang relatif lebih rendah dibanding Jawa Barat dan Jawa Timur (BPS, 2010), sehingga pertanyaan mengenai pengaruh PAD dan dana perimbangan masih layak dianalisis lebih luas. Selain itu propinsi Jawa Tengah terdiri dari 35 kabupaten/Kota yang juga memiliki disparitas pendapatan daerah yang besar sehingga memungkinkan terjadinya kemungkinan kondisi yang tidak sama antara satu kabupaten/kota dengan kabupaten/kota lainnya, selain itu perbedaan potensi daerah juga memberikan perbedaan alokasi dana perimbangan yang diberikan oleh pemerintah pusat yang merupakan menjadi salah satu masalah yang menarik untuk menguji pengaruh pendapatan asli daerah dan dana perimbangan terhadap belanja daerah di Jawa Tengah.

Data tahun 2008 hingga 2010 selanjutnya digunakan sebagai dasar analisis. Pemilihan tahun pengamatan didasarkan pada kelengkapan data yang tersedia dari sumber resmi. Selain itu pada periode tahun 2008 – 2010 relatif masih banyak terjadi fluktuasi perekonomian dunia yang memungkinkan berpengaruh terhadap perekonomian di Indonesia.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah dan gap penelitian terdahulu maka variabel dalam penelitian ini adalah Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Pengalokasian Anggaran Belanja Modal. Adapun rumusan masalah yang diajukan adalah sebagai berikut.

1. Apakah ada pengaruh antara pertumbuhan ekonomi terhadap pengalokasian anggaran belanja modal propinsi Jawa Tengah ?
2. Apakah ada pengaruh antara pendapatan asli daerah terhadap pengalokasian anggaran belanja modal propinsi Jawa Tengah ?
3. Apakah ada pengaruh antara dana perimbangan terhadap pengalokasian anggaran belanja modal propinsi Jawa Tengah ?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian yang ingin dicapai adalah :

1. Menguji pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap pengalokasian anggaran belanja modal propinsi Jawa Tengah.
2. Menguji pengaruh pendapatan asli daerah terhadap pengalokasian anggaran belanja modal propinsi Jawa Tengah.
3. Menguji pengaruh dana perimbangan terhadap pengalokasian anggaran belanja modal propinsi Jawa Tengah.

1.4 Kegunaan Penelitian

1.4.1 Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan masukan bagi pengembangan ilmu pengetahuan khususnya di bidang Akuntansi Sektor Publik.

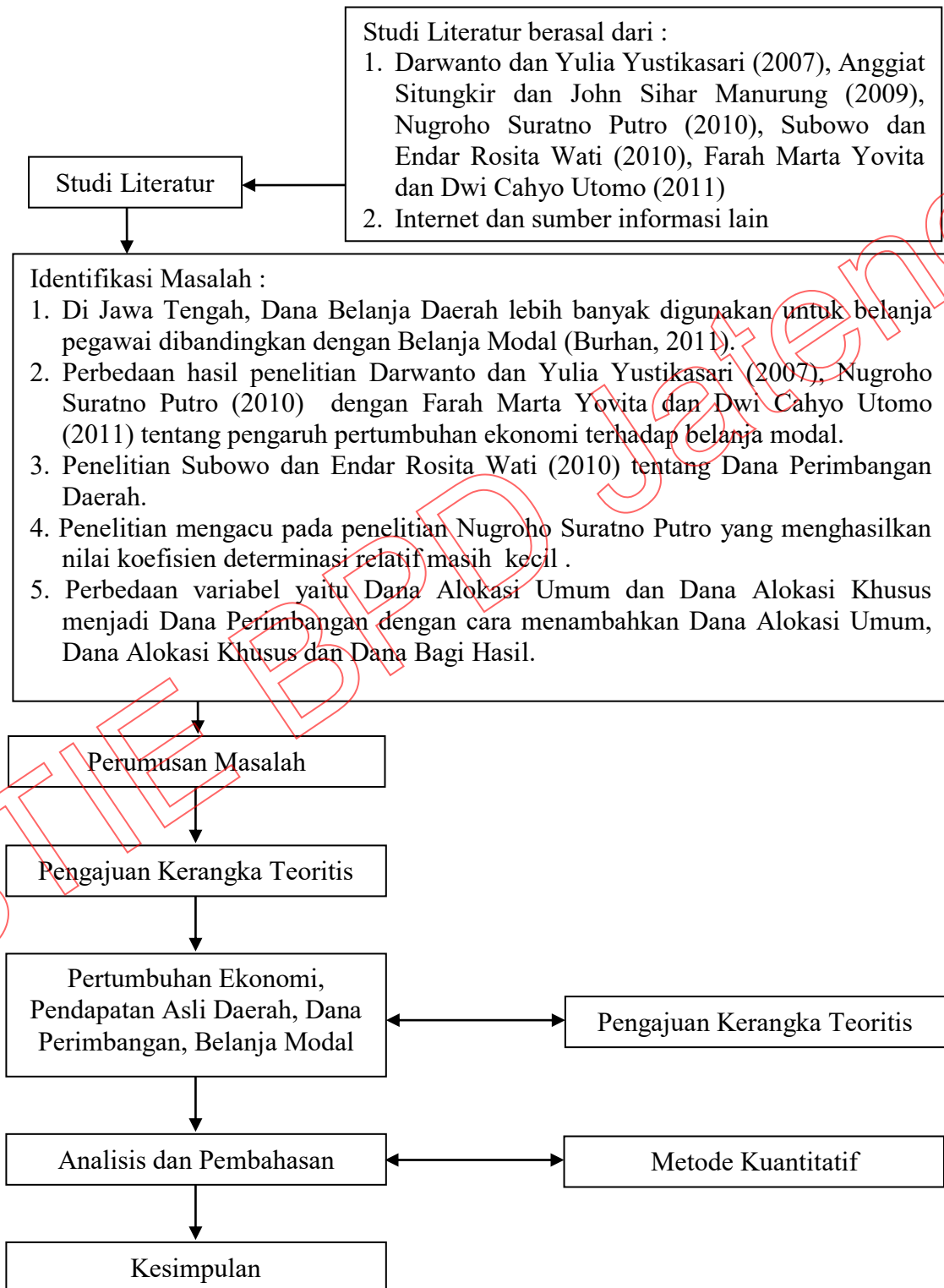
1.4.2 Kegunaan Praktis

1. Bagi Penulis adalah untuk menambah pengetahuan penulis mengenai pertumbuhan ekonomi, pendapatan asli daerah, dana perimbangan dan pengalokasian anggaran belanja modal Jawa Tengah dan dapat digunakan untuk membandingkan teori-teori yang selama ini diperoleh di perkuliahan dengan kenyataan yang ada di lapangan.
2. Bagi Pemerintah Daerah Jawa Tengah, hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan masukan kepada Pemerintah Daerah Jawa Tengah mengenai masalah pertumbuhan ekonomi, pendapatan asli daerah, dana perimbangan dan pengalokasian anggaran belanja modal Jawa Tengah sehingga akan berguna bagi penyusunan kebijakan – kebijakan lebih lanjut sebagai usaha perbaikan.
3. Bagi institusi, hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan referensi tentang masalah pengaruh pertumbuhan ekonomi, pendapatan asli daerah, dan dana perimbangan terhadap pengalokasian anggaran belanja modal Jawa Tengah.

1.5 Kerangka Penelitian

Gambar 1.1.

Kerangka Penelitian



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Tinjauan Pustaka

2.1.1 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

Pembentukan pemerintahan di daerah pada prinsipnya adalah untuk lebih memberdayakan peran serta pemerintah dan masyarakat di daerah dalam pembangunan wilayah. Mardiasmo (2004:59) menyatakan bahwa tujuan utama penyelenggaraan otonomi daerah adalah untuk meningkatkan pelayanan publik dan memajukan perekonomian daerah.

Pada UU No.17 Tahun 2003 Pasal 16 tentang Keuangan Negara disebutkan bahwa:

1. APBD merupakan pengelolaan keuangan daerah yang ditetapkan setiap tahun dengan peraturan Daerah.
2. APBD terdiri atas Anggaran Pendapatan, Anggaran Belanja, dan Pembiayaan.
3. Pendapatan Daerah berasal dari Pendapatan Asli Daerah.
4. Belanja Daerah dirinci menurut organisasi, fungsi, dan jenis belanja.

Menurut Permendagri No.32 Tahun 2008 Pasal 1 ayat 1 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2009 menyebutkan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah. Menurut Permendagri No.13 Tahun 2006 Pasal 22 ayat 1, struktur APBD merupakan satu kesatuan yang terdiri dari: Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, dan Pembiayaan Daerah.

Halim (2007) menyatakan, APBD merupakan rencana kerja pemerintah daerah yang diwujudkan dalam bentuk uang (rupiah) selama periode waktu tertentu (satu tahun) serta merupakan salah satu instrument utama kebijakan dalam upaya peningkatan pelayanan umum dan kesejahteraan masyarakat di daerah. Anggaran daerah digunakan sebagai alat untuk menentukan besar pendapatan dan pengeluaran, membantu pengambilan keputusan dan perencanaan pembangunan, otorisasi pengeluaran di masa-masa yang akan datang, sumber

pengembangan ukuran-ukuran standar untuk evaluasi kinerja, alat untuk memotivasi para pegawai, dan alat koordinasi bagi semua aktivitas dari berbagai unit kerja. Erlina (2008) menyatakan laporan realisasi anggaran menyajikan ikhtisar sumber, alokasi, dan pemakaian sumber daya ekonomi yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah, yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam satu periode pelaporan.

Pertanggung jawaban keuangan daerah merupakan tanggung jawab kepala daerah atas pelaksanaan APBD sebagaimana dalam UU No.17 Tahun 2003 dan Peraturan Pemerintah No.58 Tahun 2005. Pada UU No.17 pasal 6 Tahun 2003 presiden selaku kepala pemerintahan memegang kekuasaan pengelolaan keuangan negara sebagai bagian dari kekuasaan pemerintahan. Kekuasaan itu antara lain: diserahkan kepada bupati selaku kepala pemerintahan daerah untuk mengelola keuangan daerah dan mewakili pemerintah daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan. Penganggaran memerlukan kerjasama para pimpinan satuan kerja dalam organisasi pemerintahan. Struktur organisasi satuan kerja menunjukkan tanggungjawab setiap pelaksana anggaran. Setiap pelaksana bertanggungjawab untuk menyiapkan dan mengelola elemen anggarannya masing-masing.

Kepala SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) selaku Pengguna Anggaran menyusun Laporan Keuangan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan APBD pada Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bersangkutan. Laporan keuangan tersebut harus disampaikan oleh Kepala SKPD kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) selaku Bendahara Umum Daerah yang menyusun laporan keuangan sebagai pertanggungjawaban pengelolaan perbendaharaan daerah. Laporan Keuangan tersebut oleh PPKD disampaikan kepada gubernur/bupati/walikota untuk memenuhi pertanggungjawaban pelaksanaan APBD. Selanjutnya laporan keuangan pemerintah daerah ini disampaikan oleh gubernur/bupati/walikota kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Berdasarkan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan, gubernur/bupati/walikota memberikan tanggapan dan melakukan penyesuaian terhadap laporan keuangan serta koreksi lain berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Selanjutnya, Pejabat Pengelola Keuangan Daerah menyusun rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, yang harus disampaikan oleh gubernur/bupati/walikota kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir. Dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, Pemerintah Daerah tidak hanya diwajibkan untuk menyusun dan menyajikan Laporan Keuangan, tetapi juga harus membuat Laporan Kinerja, yang berisi ringkasan tentang keluaran dari masing-masing kegiatan dan hasil yang dicapai dari masing-masing program sebagaimana ditetapkan dalam dokumen pelaksanaan APBD.

Hal ini berarti, laporan keuangan pemerintah daerah beserta rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, dilampiri dengan ikhtisar laporan realisasi kinerja dan ikhtisar laporan keuangan Pemerintah Daerah. Rancangan peraturan daerah yang telah disetujui bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, untuk tingkat pemerintah provinsi disampaikan kepada menteri keuangan, dan untuk tingkat pemerintah kabupaten/kota disampaikan kepada gubernur.

Teori tradisional keuangan publik merupakan peran utama pada desentralisasi fiskal. Empat elemen dasar pemerintah daerah menggunakan sumber pendapatan daerahnya. Pertama, pemerintah daerah memberikan pelayanan publik yang lebih baik. Kedua, pemerintah daerah memberikan penyediaan layanan publik sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Ketiga, pemerintah daerah menggunakan anggaran untuk memberikan penyediaan layanan publik yang efisien. Dan keempat, desentralisasi dapat mendorong melakukan inovasi untuk kebijakan publik.

Teori tentang desentralisasi fiskal sudah ada sejak abad ke-17 dan ke-18. Pemerintah pusat sedikit tidak percaya, pemerintah demokratis dipandang sebagai harapan utama untuk melindungi kebebasan setiap manusia. Ada dua uraian pendukung pemerintah yang terdesentralisasi yaitu nilai efisiensi dan menilai

pemerintahan. Nilai efisiensi dipandang sebagai maksimalisasi kesejahteraan sosial.

Sektor publik tidak mengandung penetapan harga yang sama seperti sektor swasta, untuk mengatur penawaran dan permintaan. Alokasi sektor publik untuk barang dan jasa sudah menjadi politik, tetapi setelah mungkin pelayanan pajak harus mencerminkan pengumpulan preferensi anggota masyarakat. Pemerintahan harus responsif, akuntabilitas, dan membuat keputusan daerah tentang masalah-masalah dan kebutuhan daerah. Akuntabilitas melalui pemilu daerah yang cenderung didorong oleh alokasi daerah, sedangkan pemilu pemerintah pusat jarang difokuskan pada penyediaan layanan daerah.

Desentralisasi fiskal adalah penyerahan wewenang dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, fungsi khusus dengan kewenangan administratif dan pendapatan fiskal. Para ekonom umumnya berfokus pada efisiensi dan ekuitas, sedangkan administrasi publik cenderung berfokus pada kekuasaan dan akuntabilitas. Pemerintah pusat memberikan tanggung jawab dan kewenangan kepada pemerintah daerah dalam penentuan setiap program atau kegiatan daerah. Penentuan pada output daerah dengan sistem terpusat terjadi melalui keputusan dari legislatif pusat.

Desentralisasi fiskal dapat menghasilkan kesejahteraan dimana biaya penyediaan layanan publik bervariasi dengan tuntutan yang diberikan, biaya berbeda akan menghasilkan perbedaan tingkat efisien pada output. Mengukur kesejahteraan dari desentralisasi fiskal dengan memaksimalkan jumlah surplus dari penyediaan pelayanan publik yang baik.

Alasan membentuk desentralisasi fiskal antara lain: untuk membangun kapasitas daerah, pemerintah pusat mendelegasikan tanggung jawab kepada pemerintah daerah. Pemerintah daerah membantu pemerintah pusat dalam pembangunan daerah. Dan pemimpin daerah yang menuntut otonomi yang lebih dan kekuasaan perpajakan bersama dengan tanggung jawab pengeluaran daerah. Dalam membangun akuntabilitas untuk belanja daerah, pemerintah daerah harus mengontrol sendiri sumber pendapatan yang cukup untuk memungkinkan beberapa pertimbangan dalam pencocokan kebutuhan daerahnya.

2.1.2 Anggaran Daerah Sektor Publik

Anggaran daerah merupakan salah satu alat yang memegang peranan penting dalam rangka meningkatkan pelayanan publik dan didalamnya tercermin kebutuhan masyarakat dengan memperhatikan potensi dan sumber-sumber kekayaan daerah. APBN merupakan rencana keuangan tahunan pemerintah negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat/DPR (UU Keuangan Negara, 2002).

Tujuan utama proses perumusan anggaran adalah menerjemahkan perencanaan ekonomi pemerintah, yang terdiri dari perencanaan input dan output dalam satuan keuangan. Oleh karena itu, proses perumusan anggaran harus dapat menggali dan mengendalikan sumber-sumber dana publik. Proses pembuatan satu tahun anggaran tersebut dikenal dengan istilah penganggaran.

Anggaran merupakan pernyataan mengenai estimasi kinerja yang hendak dicapai selama periode waktu tertentu yang dinyatakan dalam ukuran finansial, sedangkan penganggaran adalah proses atau metode untuk mempersiapkan suatu anggaran (Mardiasmo, 2002). Proses pembuatan keputusan pengalokasian belanja modal menjadi sangat dinamis karena keterbatasan sumber daya yang dimiliki serta terdapat banyak pihak dengan kepentingan dan preferensi yang berbeda (Rubin, 1993). Penganggaran setidaknya mempunyai tiga tahapan, yakni (1) perumusan proposal anggaran, (2) pengesahan proposal anggaran, (3) pengimplementasian anggaran yang telah ditetapkan sebagai produk hukum (Samuel, 2000). Sedangkan menurut Von Hagen (2005) penganggaran terbagi ke dalam empat tahapan, yakni *executive planning*, *legislative approval*, *executive implementation*, dan *ex post accountability*. Pada kedua tahapan pertama terjadi interaksi antara eksekutif dan legislatif dan politik anggaran paling mendominasi, sementara pada dua tahap terakhir hanya melibatkan birokrasi sebagai *agent*.

Penyusunan APBD dilakukan terlebih dahulu dibuat kesepakatan antara eksekutif dan legislatif tentang Kebijakan Umum APBD dan Prioritas & Plafon Anggaran yang akan menjadi pedoman untuk penyusunan anggaran pendapatan dan anggaran belanja. Eksekutif membuat rancangan APBD dan diserahkan kepada legislatif untuk dipelajari dan dibahas bersama-sama sebelum ditetapkan

sebagai Peraturan Daerah (Perda). Dalam perspektif keagenan, hal ini merupakan bentuk kontrak (*incomplete contract*), yang menjadi alat bagi legislatif untuk mengawasi pelaksanaan anggaran oleh eksekutif.

Pengalokasian sumber daya ke dalam belanja modal (*capital expenditure*) merupakan sebuah proses yang sarat dengan kepentingan-kepentingan politis. Anggaran ini sebenarnya dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan publik akan sarana dan prasarana umum yang diberikan secara cuma-cuma oleh pemerintah daerah. Namun, adanya kepentingan politik dari lembaga legislatif yang terlibat dalam proses penyusunan anggaran menyebabkan alokasi belanja modal terdistorsi dan sering tidak efektif dalam memecahkan permasalahan di masyarakat (Keefe dan Khemani, 2003). Dalam konteks pengelolaan keuangan daerah, anggaran belanja modal sangat berkaitan dengan perencanaan keuangan jangka panjang, terutama pembiayaan untuk pemeliharaan aset tetap yang dihasilkan dari belanja modal tersebut. Konsep *Multi-Term Expenditure Framework* (MTEF) menyatakan bahwa kebijakan belanja modal harus memperhatikan kemanfaatan (*usefulness*) dan kemampuan keuangan pemerintah daerah (*budget capability*) dalam pengelolaan aset tersebut dalam jangka panjang (Allen dan Tommasi, 2001). Sesuai aturan APBD dan tujuan otonomi daerah, bahwa hakikat Anggaran Daerah adalah merupakan alat untuk meningkatkan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat, maka APBD harus benar-benar menggambarkan perangkaan ekonomis yang mencerminkan kebutuhan masyarakat untuk memecahkan masalahnya dan meningkatkan kesejahteraannya.

2.1.3 Desentralisasi fiskal di Indonesia

Definisi desentralisasi menurut UU No.32 tahun 2004 :

“Desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

Salah satu tujuan desentralisasi dan otonomi daerah adalah untuk menjadikan pemerintah lebih dekat dengan rakyatnya, sehingga pelayanan pemerintah dapat dilakukan dengan lebih efisien dan efektif. Hal ini berdasarkan

asumsi bahwa pemerintah kabupaten dan kota memiliki pemahaman yang lebih baik mengenai kebutuhan dan aspirasi masyarakat mereka daripada pemerintah pusat.

Desentralisasi terfokus pada tingkat kabupaten dan kota. Kedua pemerintahan tersebut berada pada level ketiga setelah pemerintah pusat dan provinsi. Beberapa pengamat menyarankan bahwa desentralisasi harus dilaksanakan pada tingkat provinsi karena provinsi dianggap memiliki kapasitas yang lebih besar untuk menangani seluruh tanggung jawab yang dilimpahkan dari pada kabupaten dan kota. Walaupun demikian, sudah menjadi rahasia umum bahwa pemerintah pusat merasa tidak diuntungkan secara politis jika harus membentuk pemerintahan otonom provinsi yang kuat. Alasannya adalah akan menjadi potensi yang disintegrasi yang semakin kuat (Arsyad,2004).

Terdapat beberapa alasan untuk mempunyai sistem pemerintahan yang terdesentralisasi Simanjuntak (2001) dalam Pujiati (2008): (1) Representasi demokrasi, untuk memastikan hak seluruh warga negara untuk berpartisipasi secara langsung pada keputusan yang akan mempengaruhi daerah (2) Tidak dapat dipraktikkannya pembuatan keputusan yang tersentralisasi, adalah tidak realistis pada pemerintahan yang sentralistis untuk membuat keputusan mengenai semua pelayanan rakyat seluruh negara, terutama pada negara yang berpenduduk besar seperti Indonesia (3) Pengetahuan lokal (*local knowledge*), mereka yang berada pada daerah lokal mempunyai pengetahuan yang lebih banyak mengenai kebutuhan lokal, prioritas, kondisi, dll (4) Mobilitas sumber daya, mobilitas pada bantuan dan sumber daya dapat di fasilitasi dengan hubungan yang lebih erat diantara populasi dan pembuat kebijakan pada tingkat lokal.

Menurut pasal 14 UU No. 32 tahun 2004, urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah untuk kabupaten/kota merupakan urusan yang berskala kabupaten/kota meliputi:

- a. Perencanaan dan pengendalian pembangunan;
- b. Perencanaan, pemanfaatan, dan pengawasan tata ruang;
- c. Penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
- d. Penyediaan sarana dan prasarana umum;

- e. Penanganan bidang kesehatan;
- f. Penyelenggaraan pendidikan;
- g. Penanggulangan masalah sosial;
- h. Pelayanan bidang ketenagakerjaan;
- i. Fasilitasi pengembangan koperasi, usaha kecil dan menengah;
- j. Pengendalian lingkungan hidup;
- k. Pelayanan pertanahan;
- l. Pelayanan kependudukan, dan catatan sipil;
- m. Pelayanan administrasi umum pemerintahan;
- n. Pelayanan administrasi penanaman modal;
- o. Penyelenggaraan pelayanan dasar lainnya; dan
- p. Urusan wajib lainnya yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan.

Urusan pemerintahan kabupaten/kota yang bersifat pilihan meliputi urusan pemerintahan yang secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan, dan potensi unggulan daerah yang bersangkutan.

Pada hakikatnya, terdapat tiga prinsip dalam implementasi otonomi daerah di Indonesia, yaitu:

1. Desentralisasi, yaitu adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah kepada kabupaten/kota sehingga otonomi lebih dititikberatkan pada daerah tersebut.
2. Dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah dan/atau kepada instansi vertikal di wilayah tertentu.
3. Tugas pembantuan, adalah penugasan dari pemerintah kepada daerah dan/atau desa dan pemerintah provinsi kepada kabupaten/kota dan/atau desa serta dari pemerintah kabupaten/kota kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu.

Sementara itu Bahl (1998) mengemukakan adanya prinsip-prinsip untuk melaksanakan desentralisasi fiskal, yaitu :

1. Desentralisasi fiskal adalah sebuah sistem yang komprehensif yang melibatkan level pemerintahan dan mendukung desentralisasi secara umum.

2. Prinsip *money follow function*, dimana pelimpahan wewenang harus diikuti dengan anggaran yang memadai untuk melaksanakan wewenang tersebut.
3. Adanya kemampuan yang kuat untuk memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan desentralisasi dari pemerintah pusat.
4. Harus memperhatikan karakteristik dan kemampuan masing-masing daerah dalam memberikan wewenang.
5. Harus ada *taxing power* yang kuat dari pemerintah daerah untuk melaksanakan tugas-tugas desentralisasi.
6. Pemerintah pusat harus konsisten dalam melaksanakan desentralisasi dan sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan sebelumnya.
7. Dibuat sesederhana mungkin dengan formula yang tidak rumit terutama dalam pelimpahan wewenang.
8. Disain dana perimbangan harus sesuai dengan tujuan dari desentralisasi fiskal.
9. Desentralisasi fiskal harus memperhatikan kepentingan-kepentingan dari tiap level pemerintahan agar tidak terjadi tumpang tindih tugas dan wewenang.
10. Sistem yang dikembangkan dalam dana perimbangan bisa disesuaikan dengan perkembangan yang ada.
11. Harus ada daerah yang sukses dan menjadi daerah percontohan untuk pelaksanaan desentralisasi fiskal.

Dari beberapa uraian di atas, desentralisasi fiskal adalah sebagai konsekuensi dari adanya pelimpahan wewenang sehingga daerah juga lebih leluasa untuk mendapatkan anggaran lebih untuk melaksanakan tugas desentralisasi. Pemerintah daerah dalam meningkatkan anggaran bisa melalui optimalisasi penerimaan daerah sendiri dan transfer dana perimbangan dari pemerintah pusat.

2.1.4 Pertumbuhan Ekonomi

Pengertian pertumbuhan ekonomi seringkali dibedakan dengan pembangunan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi bersangkutan-paut dengan proses peningkatan produksi barang dan jasa dalam kegiatan ekonomi masyarakat,

sementara pembangunan mengandung arti yang lebih luas. Proses pembangunan mencakup perubahan pada komposisi produksi, perubahan pada pola penggunaan (alokasi) sumber daya produksi diantara sektor-sektor kegiatan ekonomi, perubahan pada pola distribusi kekayaan dan pendapatan diantara berbagai golongan pelaku ekonomi, perubahan pada kerangka kelembagaan dalam kehidupan masyarakat secara menyeluruh. Pertumbuhan ekonomi adalah proses kenaikan *output* perkapita diproduksi dengan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) perkapita.

Boediono (1992) menyatakan, bahwa pertumbuhan ekonomi adalah proses kenaikan output dalam jangka panjang. Pemakaian indikator pertumbuhan ekonomi akan dilihat dalam kurun waktu yang cukup lama, misalnya sepuluh, duapuluh, lima puluh tahun atau bahkan lebih. Pertumbuhan ekonomi akan terjadi artinya harus berasal dari kekuatan yang ada di dalam perekonomian itu sendiri.

Ukuran yang paling penting dalam konsep ekonomi adalah produk domestik bruto (PDB) yang mengukur total nilai barang dan jasa yang dihasilkan pada suatu negara atau nasional dan PDRB untuk mengukur total nilai barang dan jasa yang dihasilkan pada suatu daerah atau lokal. PDB digunakan untuk banyak tujuan tetapi yang paling penting adalah untuk mengukur ke seluruh performa dari suatu perekonomian (Samuelson, 2004).

Namun demikian pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu ciri pokok dalam proses pembangunan, hal ini diperlukan berhubungan dengan kenyataan adanya penambahan penduduk. Bertambahnya penduduk dengan sendirinya menambah kebutuhannya akan pangan, sandang, pemukiman, pendidikan dan pelayanan kesehatan. Harga yang berubah merupakan salah satu masalah yang harus dipecahkan ahli ekonomi ketika mereka menggunakan uang sebagai tolok ukur. Salah satu alat ukur yang digunakan dalam mengukur nilai uang dari barang dan jasa adalah menggunakan harga pasar untuk barang dan jasa yang berbeda (Samuelson, 2004).

Blakely (1994) dalam Darwanto (2007) juga mengemukakan akan pentingnya peran pemerintah, dengan mengemukakan sejumlah faktor yang mempengaruhi pembangunan daerah. Faktor-faktor tersebut adalah sumber daya

alam, tenaga kerja, investasi modal, kewirausahaan, transportasi, komunikasi, komposisi sektor industri, teknologi, pasar ekspor, situasi perekonomian internasional, kapasitas pemerintah daerah, pengeluaran pemerintah dan dukungan pembangunan. Berdasarkan uraian tersebut disimpulkan semakin tinggi tingkat pertumbuhan perekonomian tentu akan mengakibatkan bertumbuhnya investasi modal swasta maupun pemerintah. Hal inilah mengakibatkan pemerintah lebih leluasa dalam menyusun anggaran belanja modal.

Menurut Sadono Sukirno (1994), pertumbuhan ekonomi adalah perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksi dalam masyarakat bertambah dan kemakmuran masyarakat meningkat. Ukuran yang sering digunakan dalam menghitung pertumbuhan ekonomi adalah Produk Domestik Bruto (PDB).

Pertumbuhan ekonomi menerangkan atau mengukur prestasi dari perkembangan suatu perekonomian. Dalam kegiatan ekonomi yang sebenarnya pertumbuhan ekonomi berarti perkembangan ekonomi fiskal yang terjadi di suatu negara, seperti pertambahan jumlah dan produksi barang industri, perkembangan infrastruktur, pertambahan jumlah sekolah, pertambahan produksi kegiatan ekonomi yang sudah ada, dan berbagai perkembangan lainnya.

Menurut Todaro (2003), terdapat tiga faktor atau komponen utama dalam pertumbuhan ekonomi dari setiap bangsa, yaitu :

1. Akumulasi Modal
2. Pertumbuhan Penduduk
3. Kemajuan teknologi

Menurut Adam Smith dalam Kuncoro (2004) proses pertumbuhan akan terjadi secara simultan dan memiliki hubungan keterkaitan antara satu dengan yang lain. Timbulnya peningkatan kinerja pada suatu sektor akan meningkatkan daya tarik bagi pemupukan modal, mendorong kemajuan teknologi, meningkatkan spesialisasi, dan memperluas pasar. Hal ini akan mendorong pertumbuhan ekonomi semakin pesat.

2.1.5 Pendapatan Asli Daerah

Salah satu wujud dari pelaksanaan desentralisasi fiskal adalah pemberian sumber-sumber penerimaan bagi daerah yang dapat digali dan digunakan sendiri sesuai dengan potensinya masing-masing. PAD mencerminkan *local taxing power* yang “cukup” sebagai *necessary condition* bagi terwujudnya otonomi daerah yang luas karena nilai dan proporsinya yang cukup dominan untuk mendanai daerah (Simanjuntak, 2005). Secara teoritis pengukuran kemandirian daerah diukur dari Pendapatan Asli Daerah (PAD). Sumber PAD berasal dari pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, dan hasil pengolahan kekayaan daerah lainnya yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Pasal 157 UU No. 32 Tahun 2004 dan pasal 6 UU No. 33 Tahun 2004 menjelaskan bahwa sumber Pendapatan Asli Daerah terdiri: Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang sah.

Menurut Undang-Undang No. 33 tahun 2004 pasal 1, “Pendapatan Asli Daerah adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber di dalam daerahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku”. Pendapatan Asli Daerah merupakan sumber penerimaan daerah yang asli digali di daerah yang digunakan untuk modal dasar pemerintah daerah dalam membiayai pembangunan dan usaha-usaha daerah untuk memperkecil ketergantungan dana dari pemerintah pusat.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf (a) Undang-undang Nomor 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah penerimaan yang diperoleh dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri, yang dipungut berdasarkan peraturan daerah dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dari pengertian tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah sejumlah nilai uang yang diterima dari masyarakat/sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri selama tahun takwin (kalender), guna membiayai setiap pengeluaran-pengeluaran baik pengeluaran rutin dan selebihnya dipergunakan untuk biaya

pembangunan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Menurut Abdul Halim (2007) kelompok Pendapatan Asli Daerah dipisahkan menjadi empat jenis pendapatan:

a. Pajak Daerah.

Sesuai UU Nomor 34 Tahun 2000 jenis pendapatan pajak untuk kabupaten/kota terdiri dari:

- 1) Pajak hotel,
- 2) Pajak restoran,
- 3) Pajak hiburan,
- 4) Pajak reklame,
- 5) Pajak penerangan jalan,
- 6) Pajak pengambilan bahan galian golongan C,
- 7) Pajak Parkir.

b. Retribusi Daerah.

Retribusi daerah merupakan pendapatan daerah yang berasal dari retribusi. Terkait dengan UU Nomor 34 Tahun 2000 jenis pendapatan retribusi untuk kabupaten/ kota meliputi objek pendapatan yang terdiri dari 29 objek.

c. Hasil pengelolaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan.

Hasil pengelolaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan merupakan penerimaan daerah yang berasal dari pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Jenis pendapatan ini dirinci menurut objek pendapatan yang mencakup:

- 1) Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah/BUMD.
- 2) Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik negara/BUMD.
- 3) Bagian laba penyertaan modal pada perusahaan milik swasta atau kelompok usaha masyarakat.

d. Lain-lain PAD yang sah.

Pendapatan ini merupakan penerimaan daerah yang berasal dari lain-lain milik Pemda. Rekening ini disediakan untuk mengakuntansikan penerimaan daerah selain yang disebut di atas. Jenis pendapatan ini meliputi objek pendapatan berikut:

- 1) Hasil penjualan aset daerah yang tidak dipisahkan.
- 2) Jasa giro.
- 3) Pendapatan bunga.
- 4) Penerimaan atas tuntutan ganti kerugian daerah.
- 5) Penerimaan komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan pengadaan barang, dan jasa oleh daerah.
- 6) Penerimaan keuangan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing.
- 7) Pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan.
- 8) Pendapatan denda pajak.
- 9) Pendapatan denda retribusi.
- 10) Pendapatan eksekusi atas jaminan.
- 11) Pendapatan dari pengembalian.
- 12) Fasilitas sosial dan umum.
- 13) Pendapatan dari penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan.
- 14) Pendapatan dari angsuran/cicilan penjualan.

Secara konseptual, perubahan pendapatan akan berpengaruh terhadap belanja atau pengeluaran, namun tidak selalu seluruh tambahan pendapatan tersebut akan dialokasikan dalam belanja. Abdullah & Halim (2004) menemukan bahwa sumber pendapatan daerah berupa PAD dan dana perimbangan berpengaruh terhadap belanja daerah secara keseluruhan. Meskipun proporsi PAD maksimal hanya sebesar 10% dari total pendapatan daerah, kontribusinya terhadap pengalokasian anggaran cukup besar, terutama bila dikaitkan dengan kepentingan politis.

Menurut Soekarwo (2003) pada dasarnya upaya Pemerintah Daerah dalam mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah dilakukan dengan cara tiga cara yaitu:

1. Intensifikasi, yaitu suatu upaya mengoptimalkan PAD dengan cara meningkatkan dari yang sudah ada (diintensifkan). Diintensifkan dalam arti operasional pemungutannya. Pengawasan (untuk melihat kebocoran), tertib administrasi dan mengupayakan Wajib Pajak yang belum kena pajak supaya dapat dikenakan pajak.

2. Ekstensifikasi, yaitu mengoptimalkan PAD dengan cara mengembangkan subjek dan objek pajak.
3. Peningkatan pelayanan kepada masyarakat, yaitu merupakan unsur yang penting mengingat bahwa paradigma yang berkembang dalam masyarakat saat ini adalah pembayaran pajak dan restribusi ini sudah merupakan hak dan kewajiban masyarakat terhadap Negara, untuk itu perlu dikaji kembali pengertian wujud layanan masyarakat yang bagaimana yang dapat memberikan kepuasan kepada masyarakat.

2.1.6 Dana Perimbangan

Dalam UU No.33/2004 disebutkan Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi. Perimbangan keuangan antara Pemerintah dan Pemerintahan Daerah adalah suatu sistem pembagian keuangan yang adil, proporsional, demokratis, transparan, dan efisien dalam rangka pendanaan penyelenggaraan desentralisasi, dengan mempertimbangkan potensi, kondisi, dan kebutuhan daerah, serta besaran pendanaan penyelenggaraan dekonsentrasi dan tugas pembantuan.

Penjelasan atas peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan bertujuan untuk menciptakan keseimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah dan antara Pemerintah Daerah. Dana Perimbangan yang terdiri dari Dana Bagi Hasil dari penerimaan pajak dan SDA, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus yang merupakan sumber pendanaan bagi daerah dalam pelaksanaan desentralisasi, yang alokasinya tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lain mengingat tujuan masing-masing jenis penerimaan tersebut saling mengisi dan melengkapi. Sedangkan Dana Bagi Hasil adalah dana yang bersumber dari APBN yang dibagikan kepada daerah berdasarkan angka persentase tertentu dengan memperhatikan potensi daerah penghasil.

Menurut Permendagri No.32 Tahun 2008, dalam rangka pelaksanaan desentralisasi, kepada daerah diberikan Dana Perimbangan melalui APBN yang bersifat transfer dengan prinsip *money follows function*. Salah satu tujuan

pemberian Dana Perimbangan tersebut adalah untuk mengurangi kesenjangan fiskal antara pemerintah dengan daerah dan antar daerah, serta meningkatkan kapasitas daerah dalam menggali potensi ekonomi daerah. Pada aspek hubungan pemerintahan pusat dan daerah ini Elmi (2002) mengungkapkan bahwa dengan adanya kebijakan tersebut diharapkan akan terjadi pembagian keuangan yang adil dan rasional. Artinya bagi daerah-daerah yang memiliki kekayaan sumber daya alam akan memperoleh bagian pendapatan yang jumlahnya lebih besar sedangkan daerah-daerah lainnya akan mengutamakan bagian dari Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK).

Adapun jenis-jenis dana perimbangan adalah sebagai berikut :

2.1.6.1 Dana Bagi Hasil (DBH)

Dana bagi hasil adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka persentase untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi, misalnya dana bagi hasil pajak (DBHP) dan dana bagi hasil bukan pajak (DBHBP). Dana bagi hasil dibagi berdasarkan persentase tertentu bagi pemerintah pusat dari eksploitasi sumber daya alam seperti minyak dan gas, pertambangan dan kehutanan yang dibagi dalam porsi yang bervariasi antara pemerintah pusat, provinsi, kabupaten, dan kota. Penerimaan yang dibagihasilkan terdiri atas :

1. Penerimaan Pajak :

- a. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
- b. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)
- c. PPh Orang Pribadi

2. Penerimaan Bukan Pajak :

- a. Sektor Kehutanan
- b. Sektor Pertambangan Umum
- c. Sektor Minyak Bumi dan Gas Alam
- d. Sektor Perikanan

2.1.6.2 Dana Alokasi Umum (DAU)

Dalam pengaturan keuangan menurut UU Nomor 25 Tahun 1999 adalah provisi berupa transfer antar pemerintah dari pusat ke kabupaten dan kota yang disebut dengan dana alokasi umum dan dana alokasi khusus. Dana Alokasi Umum adalah merupakan transfer yang bersifat umum (*block grant*) yang diberikan kepada semua kabupaten dan kota untuk tujuan mengisi kesenjangan antara kapasitas dan kebutuhan fiskalnya dan didistribusikan dengan formula berdasarkan prinsip-prinsip tertentu yang secara umum mengindikasikan bahwa daerah miskin dan terbelakang harus menerima lebih banyak dari pada daerah kaya. Dengan kata lain tujuan alokasi DAU adalah dalam rangka pemerataan kemampuan penyediaan pelayanan public antar pemda di Indonesia (Kuncoro, 2004).

Dana Alokasi Umum adalah dana yang berasal dari APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan keuangan antar daerah untuk membiayai kebutuhan pengeluarannya di dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Berkaitan dengan perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah, hal tersebut merupakan konsekuensi adanya penyerahan kewenangan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Dengan demikian, terjadi transfer yang cukup signifikan didalam APBN dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah, dan pemerintah daerah secara leluasa dapat menggunakan dana ini apakah untuk memberi pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat atau untuk keperluan lain yang tidak penting.

DAU merupakan salah satu alat bagi pemerintah pusat sebagai alat pemerataan pembangunan di Indonesia yang bertujuan untuk mengurangi ketimpangan dalam kebutuhan pembiayaan dan penguasaan pajak antara Pusat dan Daerah telah diatasi dengan adanya perimbangan keuangan antara Pusat dan Daerah (dengan kebijakan bagi hasil dan DAU minimal sebesar 25% dari Penerimaan Dalam Negeri). Dengan perimbangan tersebut, khususnya dari DAU akan memberikan kepastian bagi Daerah dalam memperoleh sumber-sumber pembiayaan untuk membiayai kebutuhan pengeluaran yang menjadi tanggung jawabnya. Hal ini sesuai dengan prinsip *fiscal gap* yang dirumuskan oleh

Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Departemen Keuangan yang sejalan dengan Sesuai dengan UU Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah bahwa kebutuhan DAU oleh suatu Daerah (Propinsi, Kabupaten dan Kota) ditentukan dengan menggunakan pendekatan konsep *fiscal gap*, di mana kebutuhan DAU suatu daerah ditentukan oleh kebutuhan daerah (*fiscal needs*) dan potensi daerah (*fiscal capacity*). Dengan pengertian lain, DAU digunakan untuk menutup celah/gap yang terjadi karena kebutuhan daerah melebihi dari potensi penerimaan daerah yang ada. Berdasarkan konsep *fiscal gap* tersebut, distribusi DAU kepada daerah-daerah yang memiliki kemampuan relatif besar akan lebih kecil dan sebaliknya daerah-daerah yang mempunyai kemampuan keuangan relatif kecil akan memperoleh DAU yang relatif besar. Dengan konsep ini beberapa daerah, khususnya daerah yang kaya sumber daya alam dapat memperoleh DAU yang negatif. Secara definisi, DAU dapat diartikan sebagai berikut :

1. Salah satu komponen dari dana perimbangan pada APBN, yang mengalokasikan didasarkan atas konsep kesenjangan fiskal atau celah fiskal (*fiscal Gap*), yaitu selisih antara kebutuhan fiskal dengan kapasitas fiskal
2. Instrumen untuk mengatasi *horizontal balance*, yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antardaerah dimana penggunaannya ditetapkan sepenuhnya oleh daerah
3. *Equalization grant*, yaitu berfungsi untuk menentralisasi ketimpangan kemampuan keuangan dengan adanya PAD, Bagi Hasil Pajak dan Bagi Hasil SDA yang diperoleh Daerah.

2.1.6.3 Dana Alokasi Khusus (DAK)

Dana Alokasi Khusus adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. Diprioritaskan untuk membantu daerah-daerah dengan kemampuan keuangan di bawah rata-rata nasional, dalam rangka mendanai kegiatan penyediaan sarana dan prasarana fisik pelayanan dasar masyarakat yang telah merupakan urusan daerah. DAK merupakan dana yang berasal dari APBN

dan dialokasikan ke daerah kabupaten/kota untuk membiayai kebutuhan tertentu yang sifatnya khusus, tergantung tersedianya dana dalam APBN (Suparmoko, 2002). Kebutuhan khusus adalah kebutuhan yang sulit diperkirakan dengan rumus alokasi umum, dan atau kebutuhan yang merupakan komitmen atau prioritas nasional.

Kebijakan DAK secara spesifik (www.depkeu.djpk.go.id) :

1. Diprioritaskan untuk membantu daerah-daerah dengan kemampuan keuangan di bawah rata-rata nasional, dalam rangka mendanai kegiatan penyediaan sarana dan prasarana fisik pelayanan dasar masyarakat yang telah merupakan urusan daerah;
2. Menunjang percepatan pembangunan sarana dan prasarana di daerah pesisir dan pulau-pulau kecil, daerah perbatasan dengan negara lain, daerah tertinggal/terpencil, daerah rawan banjir/longsor, serta termasuk kategori daerah ketahanan pangan dan daerah pariwisata;
3. Mendorong peningkatan produktivitas perluasan kesempatan kerja dan diversifikasi ekonomi terutama di pedesaan, melalui kegiatan khusus di bidang pertanian, kelautan dan perikanan, serta infrastruktur;
4. Meningkatkan akses penduduk miskin terhadap pelayanan dasar dan prasarana dasar melalui kegiatan khusus di bidang pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur;
5. Menjaga dan meningkatkan kualitas hidup, serta mencegah kerusakan lingkungan hidup, dan mengurangi risiko bencana melalui kegiatan khusus di bidang lingkungan hidup, mempercepat penyediaan serta meningkatkan cakupan dan kehandalan pelayanan prasarana dan sarana dasar dalam satu kesatuan sistem yang terpadu melalui kegiatan khusus di bidang infrastruktur;
6. Mendukung penyediaan prasarana di daerah yang terkena dampak pemekaran pemerintah kabupaten, kota, dan provinsi melalui kegiatan khusus di bidang prasarana pemerintahan;
7. Meningkatkan keterpaduan dan sinkronisasi kegiatan yang didanai dari DAK dengan kegiatan yang didanai dari anggaran Kementerian/Lembaga dan kegiatan yang didanai dari APBD;

8. Mengalihkan secara bertahap dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan yang digunakan untuk mendanai kegiatan-kegiatan yang telah menjadi urusan daerah ke DAK. Dana yang dialihkan berasal dari anggaran Departemen Pekerjaan Umum, Departemen Pendidikan Nasional dan Departemen Kesehatan

2.1.6.4 Pinjaman Daerah

Untuk membiayai kebutuhan daerah berkaitan dengan penyediaan prasarana yang dapat menghasilkan (pengeluaran modal), daerah juga dapat melakukan pinjaman baik dari dalam negeri (Pusat dan Lembaga Keuangan) maupun dari luar negeri dengan persetujuan pusat.

2.1.6.5 Lain-lain pendapatan

Lain-lain pendapatan terdiri atas pendapatan hibah dan pendapatan dana darurat. Hibah kepada daerah, yang bersumber dari luar negeri, dilakukan melalui pemerintah (pusat). Pemerintah mengalokasikan dana darurat yang berasal dari APBN untuk keperluan mendesak (bencana nasional dan atau peristiwa luar biasa) yang tidak dapat diatasi oleh daerah dengan menggunakan sumber APBD.

2.1.7 Belanja Modal

Belanja Modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang member manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja modal meliputi antara lain belanja modal untuk perolehan tanah, gedung dan bangunan, peralatan dan aset tak berwujud (PP Nomor 24 Tahun 2005). Dengan kata lain belanja modal dilakukan dalam rangka pembentukan modal yang sifatnya menambah aset tetap/inventaris yang memberikan manfaat lebih dari satu periode akuntansi, termasuk di dalamnya adalah pengeluaran untuk biaya pemeliharaan yang sifatnya mempertahankan atau menambah masa manfaat, meningkatkan kapasitas dan kualitas aset. Belanja Modal dapat dikategorikan dalam 5 (lima) kategori utama:

1. Belanja Modal Tanah

Belanja Modal Tanah adalah pengeluaran/biaya yang digunakan untuk pengadaan/ pembelian/pembebasan penyelesaian, balik nama dan sewa tanah, pengosongan, pengurangan, perataan, pematangan tanah, pembuatan sertipikat,

dan pengeluaran lainnya sehubungan dengan perolehan hak atas tanah dan sampai tanah dimaksud dalam kondisi siap pakai.

2. Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Belanja Modal Peralatan dan Mesin adalah pengeluaran/biaya yang digunakan untuk pengadaan/penambahan/penggantian, dan peningkatan kapasitas peralatan dan mesin serta inventaris kantor yang memberikan manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan dan sampai peralatan dan mesin dimaksud dalam kondisi siap pakai.

3. Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Belanja Modal Gedung dan Bangunan adalah pengeluaran/biaya yang digunakan untuk pengadaan/penambahan/penggantian, dan termasuk pengeluaran untuk perencanaan, pengawasan dan pengelolaan pembangunan gedung dan bangunan yang menambah kapasitas sampai gedung dan bangunan dimaksud dalam kondisi siap pakai.

4. Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan

Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan adalah pengeluaran/biaya yang digunakan untuk pengadaan/penambahan/penggantian/peningkatan pembangunan/ pembuatan serta perawatan, dan termasuk pengeluaran untuk perencanaan, pengawasan dan pengelolaan jalan irigasi dan jaringan yang menambah kapasitas sampai jalan irigasi dan jaringan dimaksud dalam kondisi siap pakai.

5. Belanja Modal Fisik Lainnya

Belanja Modal Fisik Lainnya adalah pengeluaran/biaya yang digunakan untuk pengadaan/penambahan/penggantian/peningkatan pembangunan/pembuatan serta perawatan terhadap fisik lainnya yang tidak dapat dikategorikan kedalam criteria belanja modal tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, dan jalan irigasi dan jaringan, termasuk dalam belanja ini adalah belanja modal kontrak sewa beli, pembelian barang-barang kesenian, barang purbakala dan barang untuk museum, hewan ternak dan tanaman, buku-buku, dan jurnal ilmiah.

Menurut Halim (2004), belanja modal merupakan belanja yang manfaatnya melebihi satu tahun anggaran dan akan menambah aset atau kekayaan daerah serta akan menambah belanja yang bersifat rutin seperti biaya pemeliharaan. Belanja modal memiliki karakteristik spesifik menunjukkan adanya berbagai pertimbangan dalam pengalokasiannya.

Aset tetap yang dimiliki sebagai akibat adanya belanja modal merupakan prasyarat utama dalam memberikan pelayanan publik oleh pemerintah daerah. Untuk menambah aset tetap, pemerintah daerah mengalokasikan dana dalam bentuk anggaran belanja modal dalam APBD. Alokasi belanja modal ini didasarkan pada kebutuhan daerah akan sarana dan prasarana, baik untuk kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan maupun untuk fasilitas publik. Biasanya setiap tahun diadakan pengadaan aset tetap oleh pemerintahan daerah, sesuai dengan prioritas anggaran dan pelayanan publik yang memberikan dampak jangka panjang secara finansial (Syukriy Abdullah, Abdul Halim : 2006).

Belanja modal dimaksudkan untuk mendapatkan aset tetap pemerintah daerah, yakni peralatan, bangunan, infrastruktur, dan harta tetap lainnya. Secara teoretis ada tiga cara untuk memperoleh aset tetap tersebut, yakni dengan membangun sendiri, menukarkan dengan aset tetap lain, dan membeli. Namun, untuk kasus di pemerintahan, biasanya cara yang dilakukan adalah dengan cara membeli. Proses pembelian yang dilakukan umumnya dilakukan melalui sebuah proses lelang atau tender yang cukup rumit.

Optimalisasi penerimaan PAD hendaknya didukung dengan upaya pemda dengan meningkatkan kualitas layanan publik. Eksploitasi PAD yang berlebihan justru akan semakin membebani masyarakat, menjadi disinsentif bagi daerah dan mengancam perekonomian secara makro (Mardiasmo,2002). Tidak efektifnya berbagai perda baru (terkait dengan ratribusi dan pajak) selama tahun 2001 bisa jadi menunjukkan tidak adanya relasi positif antara berbagai pungutan baru itu dengan kesungguhan pemda dalam meningkatkan mutu pelayanan publik (Lewis,2003). Wurzel(1999) menegaskan meskipun mempunyai kewenangan untuk menarik pajak dan retribusi (*charge*), kewenangan ini perlu dipertimbangkan untung-ruginya (*cost and benefit*), misal dalam penentuan tariff

layanan publik. Keengganan masyarakat untuk membayar pajak ataupun retribusi bisa jadi disebabkan kualitas layanan publik yang memprihatinkan. Akibatnya produk yang seharusnya bisa dijual justru direspon negatif (Mardiasmo,2002).

Berbagai belanja yang dialokasi pemerintah, hendaknya memberikan manfaat langsung bagi masyarakat. Untuk itu, untuk kepentingan jangka pendek, pungutan yang bersifat *retribusi* lebih relevan dibanding pajak. Alasan yang mendasari, pungutan ini berhubungan secara langsung dengan masyarakat. Masyarakat tidak akan membayar apabila kualitas dan kuantitas layanan publik tidak mengalami peningkatan (Mardiasmo,2002). Dari 608 perda penerimaan daerah, 90,3% merupakan retribusi (Lewis,2003). Namun, banyaknya perda ini tidak memberikan tambahan pendapatan daerah yang signifikan. Hal ini menunjukkan indikasi adanya tingkat layanan publik yang masih rendah.

Pergeseran komposisi belanja ini, juga digunakan untuk pembangunan fasilitas modal yang dibutuhkan bagi pertumbuhan ekonomi. Penelitian yang dilakukan Wong (2004) menunjukkan pembangunan sektor industri tertentu (dalam hal ini sektor jasa dan retail) memberikan kontribusi positif terhadap kenaikan pajak. Lin dan Liu (2000) menyatakan bahwa pemerintah perlu untuk meningkatkan investasi modal guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah. Mereka menemukan adanya korelasi yang kuat antara *share* (belanja) investasi pada infrastruktur dengan tingkat desentralisasi. Strategi alokasi anggaran pembangunan ini pada gilirannya mampu mendorong dan mempercepat pembangunan ekonomi nasional, sekaligus menjadi alat untuk mengurangi disparitas regional (Madjidi,1997).

2.1.8 Pentingnya Anggaran Sektor Publik dan Kelemahan Anggaran

Menurut Mardiasmo (2002:63) Anggaran sektor publik penting karena beberapa alasan, yaitu:

1. Anggaran merupakan alat bagi pemerintah untuk mengarahkan pembangunan sosial-ekonomi, menjamin kesinambungan, dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

2. Anggaran diperlukan karena adanya kebutuhan dan keinginan masyarakat yang tak terbatas dan terus berkembang, sedangkan sumber daya yang ada terbatas.
3. Anggaran diperlukan untuk menyakinkan bahwa pemerintah daerah telah bertanggung jawab terhadap rakyat.

Selain anggaran sektor publik penting, menurut Nafarin (2004) anggaran juga memiliki kelemahan antara lain:

1. Anggaran dibuat berdasarkan taksiran dan asumsi sehingga mengandung unsur ketidakpastian.
2. Menyusun anggaran yang cermat memerlukan waktu, uang, dan tenaga yang tidak sedikit, sehingga tidak semua instansi pemerintah mampu menyusun anggaran secara lengkap dan akurat.
3. Pihak yang merasa dipaksa untuk melaksanakan anggaran dapat menentang, sehingga pelaksanaan anggaran dapat menjadi kurang efektif.

2.2. Pengembangan Hipotesis

2.2.1. Hubungan Pertumbuhan Ekonomi terhadap Belanja Modal

Pertumbuhan ekonomi adalah proses kenaikan output dalam jangka panjang. Pemakaian indikator pertumbuhan ekonomi akan dilihat dalam kurun waktu yang cukup lama, misalnya sepuluh, duapuluh, lima puluh tahun atau bahkan lebih. Pertumbuhan ekonomi akan terjadi artinya harus berasal dari kekuatan yang ada di dalam perekonomian itu sendiri.

Ukuran yang paling penting dalam konsep ekonomi adalah produk domestik bruto (PDB) yang mengukur total nilai barang dan jasa yang dihasilkan pada suatu negara atau nasional dan PDRB untuk mengukur total nilai barang dan jasa yang dihasilkan pada suatu daerah atau lokal. PDB digunakan untuk banyak tujuan tetapi yang paling penting adalah untuk mengukur ke seluruh performa dari suatu perekonomian.

Peran pemerintah sangat penting dalam pembangunan daerah. Hal ini dapat dilihat dari sejumlah faktor yang mempengaruhi pembangunan daerah yang harus ditangani oleh pemerintah. Faktor-faktor tersebut adalah sumber daya alam, tenaga kerja, investasi modal, kewirausahaan, transportasi, komunikasi, komposisi

sektor industri, teknologi, pasar ekspor, situasi perekonomian internasional, kapasitas pemerintah daerah, pengeluaran pemerintah dan dukungan pembangunan.

Pemberian otonomi yang lebih besar akan memberikan dampak yang lebih besar bagi pertumbuhan ekonomi, hal inilah yang mendorong daerah untuk mengalokasikan secara lebih efisien berbagai potensi lokal untuk kepentingan pelayanan publik (Lin dan Liu, 2000; Mardiasmo, 2002; Wong, 2004).

Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 pasal 26 menyebutkan bahwa dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial, dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial. Namun demikian dalam praktiknya dalam penyusunan anggaran, usulan yang diajukan oleh eksekutif memiliki muatan mengutamakan kepentingan eksekutif (Smith dan Bertozzi, 1998). Eksekutif mengajukan anggaran yang dapat memperbesar *agency*-nya, baik dari segi finansial maupun nonfinansial. Sementara Keefer dan Khemani, 2003; Mauro, 1998; Von Hagen, 2002, secara implisit menyatakan bahwa anggaran juga digunakan oleh legislatif untuk memenuhi *self-interestnya* sehingga baik eksekutif maupun legislatif cenderung menetapkan alokasi anggaran untuk belanja modal.

Di sisi lain, daerah yang memiliki pertumbuhan ekonomi yang tinggi mencerminkan adanya peningkatan terhadap pelayanan publik maupun penyediaan infrastruktur daerah. Namun karena sifat penyediaan fasilitas dan infrastruktur tidak bersifat permanen, maka pemerintah daerah tetap akan memerlukan alokasi dana untuk pengelolaan maupun untuk pemeliharaan infrastruktur tersebut, karena jika anggaran tersebut terabaikan maka bukan tidak mungkin kualitas fasilitas maupun infrastruktur tersebut akan berkurang sehingga dapat menurunkan dukungan terhadap pertumbuhan ekonomi pada periode-periode selanjutnya.

Pertumbuhan ekonomi merupakan suatu bentuk peningkatan dari kegiatan perekonomian yang dilakukan di suatu daerah setiap tahunnya yang dinyatakan dalam bentuk angka. Tanggung jawab pemerintah kepada masyarakat adalah

memberikan pelayanan publik kepada masyarakat yang baik melalui anggaran belanja modal, karena pertumbuhan ekonomi yang baik harus didukung dengan sarana dan prasarana yang memadai guna memperlancar kegiatan ekonomi masyarakat. Sedangkan sarana dan prasarana tersebut didapat dari pengalokasian anggaran belanja modal yang sudah dianggarkan setiap tahunnya dalam APBD. Dengan demikian maka dapat disimpulkan ada hubungan antara pertumbuhan ekonomi suatu daerah terhadap pengalokasian anggaran belanja modal, apabila pertumbuhan ekonomi suatu daerah mengalami peningkatan, maka pemerintah daerah setempat juga akan terus meningkatkan alokasi belanja modalnya guna melengkapi dan memperbaiki sarana dan prasarana yang ada sesuai dengan kondisi dan situasi pada saat tahun anggaran.

Penelitian Farah Marta Yovita dan Dwi Cahyo Utomo (2011) menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi mempunyai pengaruh yang positif dan signifikan terhadap belanja modal. Dengan demikian hipotesis 1 yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

Hipotesis 1 : Terdapat pengaruh positif antara pertumbuhan ekonomi terhadap pengalokasian anggaran belanja modal.

2.2.2. Hubungan Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Modal

Pendapatan Asli Daerah menurut Undang-Undang No. 33 tahun 2004 pasal 1, "Pendapatan Asli Daerah adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber di dalam daerahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku". Pendapatan Asli Daerah merupakan sumber penerimaan daerah yang asli digali di daerah yang digunakan untuk modal dasar pemerintah daerah dalam membiayai pembangunan dan usaha-usaha daerah untuk memperkecil ketergantungan dana dari pemerintah pusat.

Perubahan pendapatan secara konseptual akan berpengaruh terhadap belanja atau pengeluaran, namun tidak selalu seluruh tambahan pendapatan tersebut akan dialokasikan dalam belanja. Sumber pendapatan daerah berupa PAD berpengaruh terhadap belanja daerah secara keseluruhan. Meskipun proporsi PAD

maksimal hanya sebesar 10% dari total pendapatan daerah, kontribusinya terhadap pengalokasian anggaran cukup besar, terutama bila dikaitkan dengan kepentingan politis. Untuk dapat membiayai pembangunan daerah khususnya belanja modal, pemerintah daerah harus dapat meningkatkan pendapatan daerah yaitu dengan meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintah di daerah. Dengan demikian, diharapkan dengan meningkatkan pendapatan daerah akan dapat meningkatkan belanja modal sehingga pembangunan daerah dapat ditingkatkan.

Anggiat Situngkir dan John Sihar Manurung (2009), Darwanto dan Yulia Yustikasari (2007), menunjukkan bahwa penerimaan pendapatan asli daerah mempunyai dampak yang positif dan signifikan terhadap belanja modal. Dengan demikian hipotesis 2 yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. Hipotesis 2 : Terdapat pengaruh positif antara pendapatan asli daerah terhadap pengalokasian anggaran belanja modal.

2.2.3. Hubungan Dana Perimbangan terhadap Belanja Modal

Pertumbuhan suatu daerah perlu didukung dengan berbagai macam infrastruktur baik sanitasi maupun sebagainya. Akan tetapi terkadang pendapatan asli daerah tidak mampu memenuhi seluruh kebutuhan maka dalam hal ini dibutuhkanlah dana transfer dari pemerintah pusat yang disebut sebagai Dana Perimbangan. Dana Perimbangan bertujuan untuk menciptakan keseimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah dan antara Pemerintah Daerah. Dana Perimbangan yang terdiri dari Dana Bagi Hasil dari penerimaan pajak dan SDA, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus yang merupakan sumber pendanaan bagi daerah dalam pelaksanaan desentralisasi, yang alokasinya tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lain mengingat tujuan masing-masing jenis penerimaan tersebut saling mengisi dan melengkapi. Sedangkan Dana Bagi Hasil adalah dana yang bersumber dari APBN yang dibagikan kepada daerah berdasarkan angka persentase tertentu dengan memperhatikan potensi daerah penghasil.

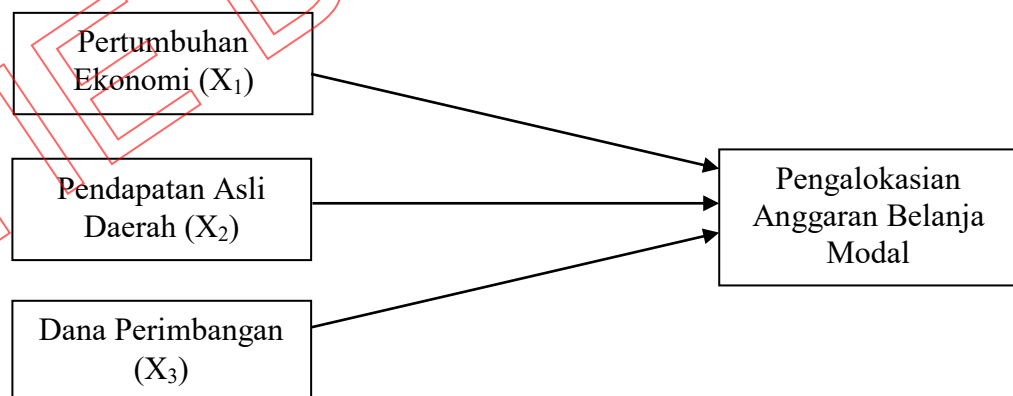
Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi. Dana perimbangan merupakan sumber penerimaan utama pemerintah daerah (sekitar 90-95%), namun dana perimbangan bersifat *contingent* karena ditentukan oleh pemerintah pusat. Karena dana perimbangan berasal dari pemerintah pusat, maka diperlukan transparansi dalam pengalokasian penggunaannya khususnya belanja modal secara efektif dan efisien. Dengan memiliki dana perimbangan maka pemerintah dapat menggunakannya untuk menutupi kebutuhan belanja modal.

Penelitian Subowo dan Endar Rosita Wati (2010), menunjukkan bahwa dana perimbangan mempunyai dampak yang positif dan signifikan terhadap belanja modal. Dengan demikian hipotesis 3 yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

Hipotesis 3 : Terdapat pengaruh positif antara dana perimbangan terhadap pengalokasian anggaran belanja modal.

2.3. Model Penelitian

Model penelitian adalah sebagai berikut.



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Definisi Konsep

Untuk lebih memperjelas dalam pembahasan penelitian maka diberikan definisi dari variable-variabel yang digunakan, yaitu :

1. Pertumbuhan ekonomi : Menurut Sadono Sukirno (1994), pertumbuhan ekonomi adalah perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksi dalam masyarakat bertambah dan kemakmuran masyarakat meningkat. Ukuran yang sering digunakan dalam menghitung pertumbuhan ekonomi adalah Produk Domestik Bruto (PDB).
2. Pendapatan asli daerah : Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf (a) Undang-undang Nomor 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah penerimaan yang diperoleh dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri, yang dipungut berdasarkan peraturan daerah dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Dana perimbangan : Dalam UU No.33/ 2004 disebutkan Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.
4. Alokasi Anggaran Belanja modal : Menurut Halim (2004), Alokasi anggaran untuk belanja modal merupakan belanja yang manfaatnya melebihi satu tahun anggaran dan akan menambah aset atau kekayaan daerah serta akan menambah belanja yang bersifat rutin seperti biaya pemeliharaan.

3.2 Definisi Operasional

Definisi operasional variabel-variabel yang digunakan, yaitu :

1. Pertumbuhan ekonomi yaitu perkembangan kegiatan ekonomi yang dilihat dari meningkatnya PDRB kabupaten/kota. PDRB yang digunakan dalam penelitian ini adalah PDRB dasar harga konstan tahun 2000 (dalam satuan rupiah).
2. Pendapatan asli daerah yaitu pendapatan kabupaten/kota di Jawa Tengah yang berasal dari total pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, dan hasil pengolahan kekayaan daerah lainnya yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah provinsi Jawa Tengah (dalam satuan rupiah).
3. Dana perimbangan yaitu dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana perimbangan yang digunakan dalam penelitian ini adalah akumulasi keseluruhan total sumber pendanaan dana perimbangan yang terdiri dari DAU, DAK, dan DBH provinsi Jawa Tengah (dalam satuan rupiah).
4. Alokasi Anggaran Belanja modal yaitu belanja yang diasumsikan sebagai Belanja Modal untuk Pelayanan Publik diindikasikan oleh Belanja Tanah, Gedung atau Bangunan, Buku Perpustakaan, Jalan dan Irigasi (dalam satuan rupiah).

3.3 Populasi dan Sampel

a. Populasi Penelitian

Populasi dalam penelitian ini adalah Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah yang terdiri dari 29 Kabupaten dan 6 Kota

b. Sampel Penelitian

Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode *purposive sampling*, yaitu teknik sampling dengan pertimbangan atau kriteria tertentu (Arikunto, 2002). Adapun kriteria sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Menerbitkan Laporan Realisasi APBD berturut-turut per 31 Desember dari tahun 2008-2010.
2. Memiliki data lengkap yang digunakan sebagai variabel dalam penelitian ini secara konsisten. Data-data tersebut meliputi tentang data PDRB, PAD, Dana Perimbangan, dan Belanja Modal.

Jumlah Kabupaten/Kota menyampaikan Laporan Realisasi APBD Tahun 2008 hingga 2010 kepada situs Dirjen Perimbangan Keuangan Pemerintah Daerah sebanyak 35 Kabupaten/Kota di Jawa Tengah. Penelitian ini dilakukan pada tahun 2008-2010 dengan data penelitian sebanyak 105 sampel, dimana jumlah tersebut diperoleh dengan rumus :

$N = \text{jumlah daerah} \times \text{periode penelitian}$

$N = 35 \times 3 \text{ tahun}$

$N = 105$

c. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif dan sumber data yang digunakan adalah data sekunder yaitu berupa data panel (pooling data). Data panel adalah sekelompok data individu yang diteliti selama rentang waktu tertentu.

Data yang dipergunakan dalam penelitian ini diperoleh dari beberapa sumber, antara lain:

1. Data PDRB atas dasar harga konstan tahun 2000 pada kurun waktu tahun 2008-2010 bersumber dari kantor BPS Propinsi Jawa Tengah
2. Data Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada kurun waktu tahun 2008-2010 bersumber dari kantor BPS Propinsi Jawa Tengah.
3. Data Dana Perimbangan pada kurun waktu 2008-2010 bersumber dari kantor BPS Provinsi Jawa Tengah
4. Data Belanja Modal pada kurun waktu tahun 2008-2010 bersumber dari kantor BPS Propinsi Jawa Tengah.

Penelitian ini seluruhnya menggunakan data sekunder dari 35 Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah tahun 2008-2010.

3.4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data adalah merupakan suatu usaha dasar untuk mengumpulkan data dengan prosedur standar. Pengumpulan data dilakukan dengan dokumentasi, yaitu mengumpulkan catatan-catatan atau data-data yang diperlukan sesuai penelitian yang akan dilakukan dari dinas/kantor/instansi atau lembaga terkait (Arikunto, 2002). Data sekunder tersebut diperoleh dari dokumen resmi yang dikeluarkan instansi yang terkait. Pengumpulan dilakukan dengan studi pustaka dari buku-buku, laporan penelitian, buletin, jurnal ilmiah, dan penerbitan lainnya yang relevan dengan penelitian ini.

3.5. Metode Analisis Data

3.5.1. Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif digunakan untuk menunjukkan gambaran umum mengenai kondisi dari masing-masing variabel yang berupa nilai rata-rata dari masing-masing variabel, nilai terendah, nilai tertinggi dan standar deviasi dari masing-masing variabel. Selain itu juga ditampilkan pola yang terbentuk dari masing-masing variabel.

3.5.2. Analisis Regresi Berganda

Adapun analisis kuantitatif yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan : Analisis Regresi Berganda. Analisis regresi digunakan untuk mengetahui pengaruh satu variabel atau lebih terhadap variabel lain. Analisis ini digunakan untuk membuktikan apakah ada pengaruh antara pertumbuhan ekonomi, pendapatan asli daerah, dan dana perimbangan sebagai variabel bebas terhadap belanja modal sebagai variabel terpengaruh.

Oleh karena menggunakan 3 variabel maka model analisis regresi yang digunakan adalah regresi berganda.

Persamaan regresi adalah :

$$Y = \alpha + \beta_1 \text{PDRB} + \beta_2 \text{PAD} + \beta_3 \text{DP}$$

dimana :

Y = Belanja Modal (BM)

α = Konstanta

β = Slope atau koefisien regresi atau intersep

PDRB = Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

PAD = Pendapatan Asli Daerah (PAD)

DP = Dana Perimbangan (DP)

3.5.3. Uji Asumsi Klasik

Penggunaan model regresi berganda dalam menguji hipotesis haruslah menghindari kemungkinan terjadinya penyimpangan asumsi klasik. Dalam penelitian ini asumsi klasik yang dianggap penting adalah tidak terjadi multiokolinearitas antar variabel independen, tidak terjadi heteroskedastisitas atau varian variabel pengganggu yang konstan (homoskedastisitas) dan tidak terjadi autokorelasi antar residual setiap variabel independen (Gujarati, 1995).

1. Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel-variabel independen dan variabel dependen mempunyai distribusi normal atau tidak. Untuk mendeteksi normalitas dapat dilakukan dengan uji statistik. Test statistik yang digunakan antara lain analisis grafik histogram, normal *probability plots* dan Kolmogorov-Smirnov test (Ghozali, 2007). Apabila tingkat signifikansi hitung $> 0,05$ maka data dikatakan normal (Ghozali, 2007).

2. Uji Multikolinearitas

Pengujian terhadap gejala multikolinearitas ini dilakukan untuk mengetahui apakah terdapat korelasi/hubungan yang kuat antar variabel-variabel independen dalam model persamaan regresi. Adanya multikolinearitas dalam model persamaan regresi yang digunakan akan mengakibatkan ketidakpastian estimasi, sehingga mengarahkan kesimpulan yang meneriam hipotesis nol. Hal ini menyebabkan koefisien regresi menjadi tidak signifikan dan standar deviasi sangat sensitive terhadap perubahan data (Gujarati, 1995). Dengan demikian variabel-variabel yang mempunyai indikasi kuat terhadap pelanggaran asumsi klasik akan dikeluarkan dari model

penelitian.

Gejala multikolinearitas dideteksi dengan menggunakan perhitungan *Tolerance* (TOL) dan *Variance Inflation Factor* (VIF) serta *Person Correlation Matrix*. Menurut Gujarati (1995) semakin besar nilai VIF maka semakin bermasalah atau semakin tinggi kolinearitas antar variabel independen. Sebagai *rule of thumb* adalah jika nilai VIF = 1, menunjukkan tidak adanya kolinearitas antar variabel independen, dan bila nilai VIF < 10, maka tingkat multikolinearitasnya belum tergolong berbahaya. Sedangkan nilai *Tolerance* (TOL) berkisar antara 0 dan 1. Jika TOL = 1, maka tidak terdapat kolinearitas antar variabel independen. Jika TOL = 0, maka terdapat kolinearitas yang tinggi dan sempurna antar variabel independen. Sebagai *rule of thumb*, jika nilai TOL > 0.10, maka tidak terdapat kolinearitas yang tinggi antar variabel independen (Hair, 1992). Selanjutnya *Person Correlation Matrix* digunakan untuk mengetahui nilai koefisien korelasi antar variabel independen. Jika nilai koefisien < 0.80 maka tidak terdapat multikolinearitas yang berbahaya dalam model penelitian (Gujarati, 1995). Menurut Hair *et al.* (1992), tingkat multikolinearitas adalah berbahaya bila nilai VIF < 10, namun demikian, setiap analisis dapat menentukan sendiri berapa besarnya nilai TOL dan VIF yang diinginkan, karena gejala multikolinearitas tersebut akan selalu ada dalam setiap model penelitian.

3. Uji Heteroskedastisitas

Heteroskedastisitas yaitu variabel pengganggu (e_i) yang memiliki variabel yang berbeda dari satu observasi ke observasi lainnya atau varian antar variabel independen tidak sama. Hal ini melanggar asumsi homoskedastisitas yaitu variabel penjelas memiliki varian yang sama (konstan). Untuk mendeteksi adanya gejala heteroskedastisitas dalam model persamaan regresi digunakan metode Glejser, dengan langkah-langkah sebagai berikut; Pertama, melakukan regresi sederhana antara nilai absolut e_i dan tiap-tiap variabel independen. Terjadinya heteroskedastisitas apabila koefisien regresi suatu variabel bebas, signifikan pada taraf 5% atau tingkat signifikansi hitung variabel bebas < 0,05.

3.5.4. Pengujian Hipotesis

Dalam penelitian ini analisis data yang digunakan adalah analisis kuantitatif, yaitu analisis yang menggunakan perhitungan matematis dan angka-angka statistik untuk memperjelas permasalahan (Setiawan, 2004).

1. Uji F test

Uji F test digunakan untuk menguji pengaruh simultan antara variabel bebas terhadap variabel terikat.

Hipotesis :

- a. Hipotesis nol (H_0) yaitu tidak ada pengaruh yang positif dan signifikan antara variabel bebas secara simultan terhadap variabel terikatnya.
- b. Hipotesis alternatif (H_a) yaitu ada pengaruh yang positif dan signifikan antara variabel bebas secara parsial terhadap variabel terikatnya.

Pengujian :

- Derajat kebebasan (db) = $n - k - 1$
- Tingkat kepercayaan 95% atau $\alpha = 5\%$

Kriteria pengujian

- Hipotesis alternative (H_a) diterima apabila tingkat signifikansi < dibandingkan dengan α (0,05)
- Hipotesis nol (H_0) diterima apabila tingkat signifikansi > dibandingkan dengan α (0,05)

2. Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi persamaan regresi digunakan untuk dapat mengetahui besarnya persentase pengaruh semua variabel independen terhadap nilai variabel dependen. Besarnya koefisien determinasi dari 0 sampai dengan 1. Semakin mendekati 0 (nol) besarnya koefisien determinasi suatu persamaan regresi, maka semakin kecil pula pengaruh semua variabel independen terhadap nilai variabel dependen. Sebaliknya semakin mendekati 1 (satu) besarnya koefisien determinasi suatu persamaan regresi, maka semakin besar pula pengaruh semua variabel independen terhadap variabel dependen. Adapun besarnya koefisien determinasi dapat dilihat dari nilai *adjusted R-square*.

3. Uji t test

Uji t test digunakan untuk menguji pengaruh parsial antara variabel bebas terhadap variabel terikat.

Hipotesis :

- a. Hipotesis nol (H_0) yaitu tidak ada pengaruh yang positif dan signifikan antara variabel bebas secara parsial terhadap variabel terikatnya.
- b. Hipotesis alternatif (H_a) yaitu ada pengaruh yang positif dan signifikan antara variabel bebas secara parsial terhadap variabel terikatnya.

Pengujian :

- Derajat kebebasan (db) = $n - k$
- Tingkat kepercayaan 95% atau $\alpha = 5\%$

Kriteria pengujian

- Hipotesis alternatif (H_a) diterima apabila tingkat signifikansi < dibandingkan dengan α (0,05)
- Hipotesis nol (H_0) diterima apabila tingkat signifikansi > dibandingkan dengan α (0,05)

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Gambaran Umum Objek Penelitian

4.1.1. Sampel Penelitian

Objek dari penelitian ini adalah pemerintah daerah Kabupaten dan Kota se-Jawa Tengah yang menerbitkan Laporan Realisasi APBD, data Produk Domestik Regional Bruto, data Pendapatan Asli Daerah, dan Dana Perimbangan selama tahun 2008 sampai dengan tahun 2010 yang diperoleh dari BPS Jawa Tengah dan melalui situs internet departemen keuangan dengan alamat <http://www.djpk.depkeu.go.id/>. Penelitian ini dilakukan untuk menguji pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, dan Dana Perimbangan terhadap Alokasi Belanja Modal.

Populasi dari penelitian ini adalah sebanyak 35 pemerintah kabupaten dan kota selama tahun 2008 sampai dengan tahun 2010. Penentuan sampel dari penelitian ini menggunakan metode *purposive sampling*, yaitu teknik sampling dengan pertimbangan atau kriteria tertentu (Arikunto, 2002). Atas dasar penentuan jumlah sampel yang telah ditetapkan pada bab sebelumnya, maka diperoleh jumlah sampel dari penelitian selama 2008 sampai dengan 2010 adalah sebesar 35 pemerintah kabupaten dan kota. Proses penentuan sampel dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 4.1
Kriteria Sampel

Keterangan	Jumlah
1. Menerbitkan Laporan Realisasi APBD berturut-turut per 31 Desember dari tahun 2008-2010.	35
2. Memiliki Data lengkap yang digunakan sebagai variabel dalam penelitian ini dan secara konsisten. Data-data tersebut meliputi tentang PDRB, PAD, Dana Perimbangan, dan Belanja Modal.	35
Jumlah sampel/Data penelitian	35

Adapun daftar nama-nama pemerintah kabupaten dan kota yang menjadi sampel dapat dilihat di tabel 4.2 di bawah ini :

Tabel 4.2
Kabupaten dan Kota Sampel

No	Pemerintah Daerah	No	Pemerintah Daerah
1	Kabupaten Banjarnegara	19	Kabupaten Pemasang
2	Kabupaten Banyumas	20	Kabupaten Purbalingga
3	Kabupaten Batang	21	Kabupaten Purworejo
4	Kabupaten Blora	22	Kabupaten Rembang
5	Kabupaten Boyolali	23	Kabupaten Semarang
6	Kabupaten Brebes	24	Kabupaten Sragen
7	Kabupaten Cilacap	25	Kabupaten Sukoharjo
8	Kabupaten Demak	26	Kabupaten Tegal
9	Kabupaten Grobogan	27	Kabupaten Temanggung
10	Kabupaten Jepara	28	Kabupaten Wonogiri
11	Kabupaten Karanganyar	29	Kabupaten Wonosobo
12	Kabupaten Kebumen	30	Kota Magelang
13	Kabupaten Kendal	31	Kota Pekalongan
14	Kabupaten Klaten	32	Kota Salatiga
15	Kabupaten Kudus	33	Kota Semarang
16	Kabupaten Magelang	34	Kota Surakarta
17	Kabupaten Pati	35	Kota Tegal
18	Kabupaten Pekalongan		

Sumber : Statistik Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 2008-2010, Realisasi APBD 2008-2010, diolah

Dari tabel 4.2 di atas dapat diketahui bahwa jumlah pemerintah kabupaten dan kota yang digunakan sebagai sampel dalam penelitian ini berjumlah 35 pemerintah kabupaten dan kota. Sampel tersebut didominasi oleh pemerintah kabupaten yang berjumlah 29 kabupaten, sedangkan untuk pemerintah kota hanya berjumlah 6 kota.

4.2. Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif variabel penelitian dimaksudkan untuk menggambarkan statistic dasar rata-rata, standar deviasi dari variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini.

Tabel 4.3

Pendapatan Asli Daerah Jawa Tengah 2008-2010

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Alokasi Anggaran Belanja Modal	105	Rp 33.876.627.000	Rp 274.529.979.000	Rp 112.966.175.476,19	Rp 40.372.921.816,519
PDRB	105	Rp 832.154.880.000	Rp 21365.817.800.000	Rp 4.227.068.610.761,91	Rp 3.582.083.703.544,224
PAD	105	Rp 22.544.920.000	Rp 293.826.726.000	Rp 71.378.487.914,29	Rp 41.759.718.495,110
Dana Perimbangan	105	Rp 85.549.657.000	Rp 458.352.408.000	Rp 168.199.852.351,22	Rp 56.414.613.083,543
Valid N (listwise)	105				

Sumber : Data sekunder yang diolah, lampiran

Tabel 4.2 menunjukkan nilai statistic deskriptif dari masing-masing variabel penelitian. Penjelasan dari masing-masing variabel diuraikan sebagai berikut:

4.2.1. Alokasi Anggaran Belanja Modal

Rata-rata Alokasi Anggaran Belanja Modal pada 35 daerah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah selama tahun 2008-2010 dalam ribuan rupiah menunjukkan rata-rata sebesar Rp 112.966.175.476,19 per tahun. Hal ini menunjukkan bahwa besarnya alokasi pengeluaran pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah untuk pembelanjaan dan perbaikan berbagai fasilitas untuk umum mencapai Rp 112.966.175.476,19 per tahun. Nilai belanja modal terendah adalah sebesar Rp 33.876.627.000 di Kota Salatiga tahun 2010 dan nilai belanja modal tertinggi adalah sebesar Rp 274.529.979.000 di Kota Semarang tahun 2009.

4.2.2. Pendapatan Asli Daerah

Rata-rata Pendapatan Asli Daerah di 35 Kabupaten/Kota di Jawa Tengah selama tahun 2008-2010 menunjukkan rata-rata sebesar Rp 71.378.487.914,29 per tahun. Hasil tersebut menunjukkan bahwa rata-rata pendapatan yang diperoleh Kabupaten/Kota di Jawa Tengah dari pajak dan retribusi daerah mencapai Rp

71.378.487.914,29 per tahun. Nilai PAD terendah adalah sebesar Rp 22.544.920.000 di Kota Pekalongan tahun 2009 sedangkan nilai PAD tertinggi mencapai Rp 293.826.726.000 di Kota Semarang tahun 2010.

Pola yang dibentuk dari hubungan PAD dengan belanja modal pada 35 Kabupaten / Kota di Jawa Tengah selama tahun 2008-2010 adalah sebagai berikut:



Sumber : Data sekunder yang diolah, lampiran

Gambar 4.1

Pola Hubungan PAD dengan Alokasi Anggaran Belanja Modal

Pola yang terbentuk menunjukkan bahwa kabupaten / Kota dengan PAD yang besar cenderung memiliki belanja modal yang lebih besar.

4.2.3. Dana Perimbangan

Rata-rata Dana Perimbangan yang diperoleh 35 Kabupaten/Kota di Jawa Tengah selama tahun 2008-2010 menunjukkan rata-rata sebesar Rp 168.199.852.351,22 per tahun. Hasil tersebut menunjukkan bahwa rata-rata dana alokasi umum, Dana Alokasi khusus dan bagi hasil yang diperoleh dari Pemerintah Pusat mencapai Rp 168.199.852.351,22 per tahun. Nilai Dana

Perimbangan terendah adalah sebesar Rp 85.549.657.000 di Kota Magelang tahun 2008 sedangkan nilai Dana perimbangan tertinggi mencapai Rp 458.352.408.000 di Kota Semarang tahun 2009.

Pola yang dibentuk dari hubungan Dana Perimbangan dengan Belanja Modal pada 35 Kabupaten/Kota di Jawa Tengah selama tahun 2008-2010 adalah sebagai berikut:



Sumber : Data sekunder yang diolah, lampiran

Gambar 4.2

Pola Hubungan Dana Perimbangan dengan Alokasi Anggaran Belanja Modal

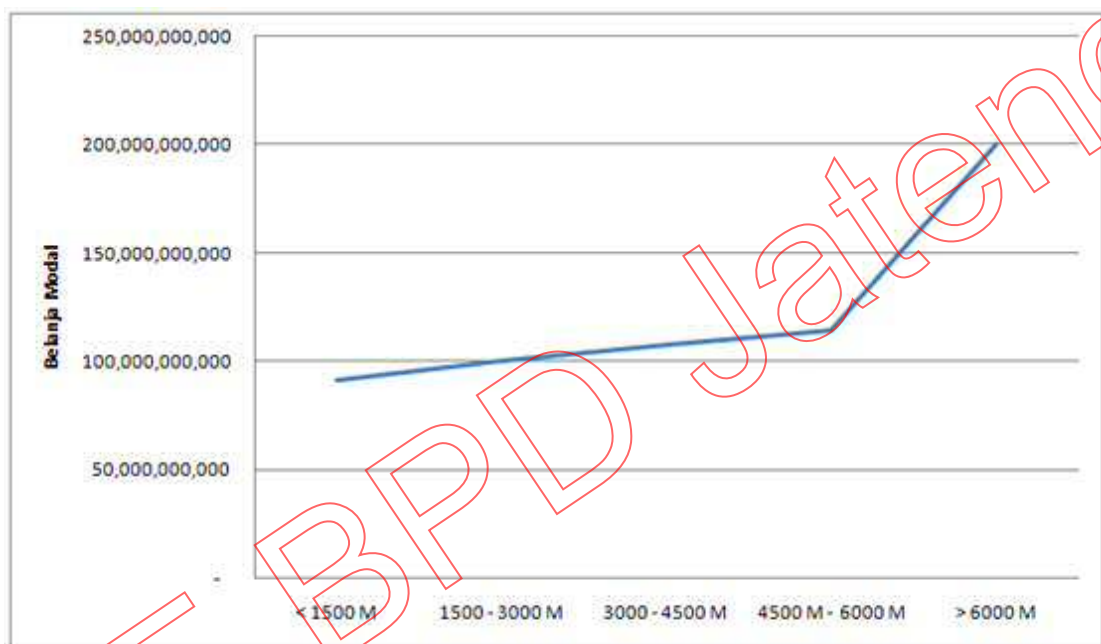
Pola yang terbentuk menunjukkan bahwa Kabupaten/Kota dengan dana perimbangan yang besar cenderung memiliki belanja modal yang lebih besar.

4.2.4. PDRB

Rata-rata PDRB yang diperoleh 35 Kabupaten/Kota di Jawa Tengah selama tahun 2008-2010 menunjukkan rata-rata sebesar Rp 4.227.068.610.761,91 per tahun. Hasil tersebut menunjukkan bahwa rata-rata Produk Domestik Regional

Bruto yang diperoleh dari Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah mencapai Rp 4.227.068.610.761,91 per tahun. Nilai PDRB terendah adalah sebesar Rp 832.154.880.000 di Kota Salatiga tahun 2008 sedangkan nilai PDRB tertinggi mencapai Rp 21.365.817.800.000 di Kota Semarang tahun 2010.

Pola yang dibentuk dari hubungan Dana Perimbangan dengan Belanja Modal pada 35 Kabupaten/Kota di Jawa Tengah selama tahun 2008-2010 adalah sebagai berikut:



Sumber : Data sekunder yang diolah, lampiran

Gambar 4.3

Pola Hubungan PDRB dengan Alokasi Anggaran Belanja Modal

Pola yang terbentuk menunjukkan bahwa kabupaten/Kota dengan PDRB yang besar cenderung memiliki Belanja Modal yang lebih besar.

4.3. Hasil Analisis

4.3.1. Uji Asumsi Klasik

4.3.1.1. Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel-variabel independen dan variabel dependen mempunyai distribusi normal atau tidak. Untuk mendeteksi normalitas dapat dilakukan dengan uji statistik. Test statistik yang digunakan adalah uji Kolmogorov-Smirnov test. Hasil pengujian diperoleh sebagai berikut:

Tabel 4.4
Uji Normalitas Kolmogorov Smirnov

Nilai Kolmogorov Smirnov	Sig	Keterangan
0,591	0,875	Normal

Sumber : Data sekunder yang diolah, lampiran

Pengujian menggunakan kolmogorov smirnov test menunjukkan bahwa tingkat signifikansi sebesar $0,875 > 0,05$. Dengan demikian data dinyatakan normal dan telah memenuhi asumsi uji normalitas.

4.3.1.2. Uji Multikolinieritas

Pengujian terhadap gejala multikolinieritas ini dilakukan untuk mengetahui apakah terdapat korelasi/hubungan yang kuat antar variabel-variabel independen dalam model persamaan regresi. Adanya multikolinieritas dalam model persamaan regresi yang digunakan akan mengakibatkan ketidakpastian estimasi, sehingga mengarahkan kesimpulan yang meneriam hipotesis nol. Hal ini menyebabkan koefisien regresi menjadi tidak signifikan dan standar deviasi sangat sensitive terhadap perubahan data. Pengujian multikolinieritas dilakukan dengan menggunakan korelasi antar variabel penelitian *tolerance* dan VIF. Hasil pengujian multikolinieritas adalah sebagai berikut:

Tabel 4.5
Uji Multikolinieritas

Variabel	Tolerance	VIF	Keterangan
PDRB	0,251	3,983	Bebas multikolinieritas
PAD	0,239	4,178	Bebas multikolinieritas
Dana Perimbangan	0,263	3,807	Bebas multikolinieritas

Sumber : Data sekunder yang diolah, lampiran

Pengujian multikolinieritas menggunakan nilai VIF menunjukkan bahwa nilai VIF sebesar 3,983; 4,178 dan 3,807 yang semuanya lebih kecil dari 10, sehingga persamaan yang terjadi dinyatakan bebas dari multikolinieritas.

4.3.1.3. Uji Heteroskedastisitas

Heteroskedastisitas yaitu variabel pengganggu (e_i) yang memiliki variabel yang berbeda dari satu observasi ke observasi lainnya atau varian antar variabel independen tidak sama. Hal ini melanggar asumsi homoskedastisitas yaitu variabel penjelas memiliki varian yang sama (konstan). Untuk mendeteksi adanya gejala heteroskedastisitas dalam model persamaan regresi digunakan metode scatter plot dan Glejser. Hasil pengujian autokorelasi adalah sebagai berikut:

Tabel 4.6
Uji Heteroskedastisitas Glejser

Variabel	t	Sig.	Keterangan
PDRB	-0,444	0,658	Bebas heteroskedastisitas
PAD	0,543	0,588	Bebas heteroskedastisitas
Dana Perimbangan	0,852	0,396	Bebas heteroskedastisitas

Sumber : Data sekunder yang diolah, lampiran

Pengujian heteroskedastisitas menggunakan uji glejser menunjukkan bahwa tidak ada variabel yang signifikan pada tingkat signifikan 5% sehingga dinyatakan tidak terjadi heteroskedastisitas.

4.3.2. Analisis regresi berganda

Dari hasil perhitungan dapat kita ketahui bahwa persamaan regresi berganda adalah:

Tabel 4.7
Model Regresi

Variabel	Koefisien	t	Sig.
(Constant)	50380426422,300	5,013	0,000
PDRB	0,003	2,213	0,029
PAD	0,258	2,014	0,047
Dana Perimbangan	0,182	2,006	0,047
<hr/>			
F	45,699		
Sig F	0,000		
R ²	0,576		
Adj R ²	0,563		

Sumber : Data sekunder yang diolah, lampiran

Model persamaan regresi dapat ditulis sebagai berikut :

$$BM = 50380426422,300 + 0,003 \text{ PDRB} + 0,258 \text{ PAD} + 0,182 \text{ DP} + e$$

Dari persamaan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Konstanta diperoleh sebesar Rp 50.380.426.422,300. Hal ini berarti bahwa apabila PAD, DP dan PDRB sama dengan nol maka nilai Alokasi Anggaran Belanja Modal akan konstan sebesar Rp 50.380.426.422,300.
2. Koefisien variabel PDRB adalah sebesar 0,003. Hal ini berarti bahwa jika PDRB mengalami kenaikan sebesar 1 rupiah maka alokasi anggaran untuk belanja modal akan mengalami kenaikan sebesar 0,003 rupiah, dengan asumsi bahwa variabel DP dan PAD adalah tetap.

3. Koefisien variabel PAD adalah sebesar 0,258. Hal ini berarti bahwa jika PAD mengalami kenaikan sebesar 1 rupiah maka alokasi anggaran untuk Belanja Modal akan mengalami kenaikan sebesar 0,258 rupiah, dengan asumsi bahwa variabel DP dan PDRB adalah tetap.
4. Koefisien variabel Dana Perimbangan adalah sebesar 0,182. Hal ini berarti bahwa jika Dana Perimbangan mengalami kenaikan sebesar 1 rupiah maka alokasi anggaran untuk Belanja Modal akan mengalami kenaikan sebesar 0,182 rupiah, dengan asumsi bahwa variabel PAD dan PDRB adalah tetap.

4.3.3. Uji Model

Uji model dilakukan dengan menggunakan uji F yaitu menguji pengaruh variabel PAD, DP dan PDRB secara bersama-sama terhadap alokasi anggaran untuk belanja modal. Hasil pengujian disajikan pada Tabel 4.7 sebelumnya. Dari hasil perhitungan dapat kita ketahui bahwa F hitung (45,699) dengan signifikansi sebesar 0,000. Nilai signifikansi tersebut lebih kecil dari 0,05. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh dari PAD, DP, dan PDRB secara bersama-sama terhadap alokasi anggaran Belanja Modal.

4.3.4. Koefisien determinasi (R^2)

Koefisien determinasi menunjukkan besarnya pengaruh variabel bebas yaitu PAD, DP, dan PDRB secara bersama-sama terhadap belanja modal. Nilai koefisien determinasi disajikan pada Tabel 4.7 sebelumnya. Dari hasil perhitungan dapat kita ketahui bahwa nilai koefisien determinasi (adjusted R Square) adalah sebesar 0,563 atau 56,3 %. Hal ini berarti bahwa variabel PAD, DP dan PDRB secara bersama – sama memiliki pengaruh sebesar 56,3 % terhadap alokasi anggaran Belanja Modal. Sedangkan sisanya sebesar 0,437 atau 43,7 % dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak termasuk dalam penelitian tersebut.

4.3.5. Pengujian Hipotesis

1. Pengaruh PDRB terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal

Hasil pengujian pengaruh PDRB terhadap Alokasi anggaran Belanja Modal diperoleh sebagai berikut :

Tabel 4.8

Tabel pengujian pengaruh PDRB terhadap Alokasi Anggaran Belanja Modal

Variabel	T	Sig
PDRB	2,213	0,029

Sumber : Data sekunder yang diolah, lampiran

Hasil perhitungan pengaruh PDRB terhadap alokasi anggaran belanja modal diperoleh nilai koefisien regresi memiliki arah positif. Diperoleh nilai t sebesar 2,213 dengan signifikansi sebesar 0,029. Nilai signifikansi tersebut lebih kecil dari 0,05. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh positif PDRB terhadap Alokasi anggaran Belanja Modal. Hal ini berarti bahwa peningkatan PDRB akan meningkatkan alokasi anggaran Belanja Modal dan penurunan PDRB akan menurunkan alokasi anggaran Belanja Modal. Dengan demikian hipotesis 1 diterima.

2. Pengaruh PAD terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal

Hasil pengujian pengaruh PAD terhadap Alokasi Anggaran Belanja Modal diperoleh sebagai berikut:

Tabel 4.9

Tabel pengujian pengaruh PAD terhadap Alokasi Anggaran Belanja Modal

Variabel	T	Sig
PAD	2,014	0,047

Sumber : Data sekunder yang diolah, lampiran

Hasil perhitungan pengaruh PAD terhadap alokasi anggaran belanja modal diperoleh nilai koefisien regresi memiliki arah positif. Diperoleh nilai t sebesar 2,014 dengan signifikansi sebesar 0,047. Nilai signifikansi tersebut lebih kecil dari 0,05. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa terdapat

pengaruh positif PAD terhadap alokasi anggaran belanja modal. Hal ini berarti bahwa peningkatan PAD akan meningkatkan Belanja Modal dan penurunan PAD akan menurunkan Alokasi anggaran Belanja Modal. Dengan demikian Hipotesis 2 diterima.

3. Pengaruh Dana Perimbangan terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal

Hasil pengujian pengaruh PDRB terhadap Alokasi Anggaran Belanja Modal diperoleh sebagai berikut:

Tabel 4.10

Tabel pengujian pengaruh Dana Perimbangan terhadap Alokasi Anggaran Belanja Modal

Variabel	T	Sig
Dana Perimbangan	2,006	0,047

Sumber : Data sekunder yang diolah, lampiran

Hasil perhitungan pengaruh Dana Perimbangan terhadap alokasi anggaran belanja modal diperoleh nilai koefisien regresi memiliki arah positif. Diperoleh nilai t sebesar 2,006 dengan signifikansi sebesar 0,047. Nilai signifikansi tersebut lebih kecil dari 0,05. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh positif Dana Perimbangan terhadap alokasi anggaran belanja modal. Hal ini berarti bahwa peningkatan Dana Perimbangan akan meningkatkan Alokasi anggaran Belanja Modal dan penurunan Dana Perimbangan akan menurunkan Alokasi anggaran Belanja Modal. Dengan demikian Hipotesis 3 diterima.

4.4. Pembahasan

1. Pengaruh PDRB terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pertumbuhan Ekonomi yang diukur dengan PDRB memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap Alokasi anggaran Belanja Modal pada pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah. Hal

ini berarti bahwa daerah Kabupateb/Kota yang memiliki PDRB yang tinggi akan mengalokasikan Belanja Modal yang tinggi pula. Demikian pula sebaliknya, daerah Kabupaten/Kota yang memiliki PDRB yang rendah akan mengalokasikan Belanja Modal yang rendah.

Desentralisasi yang dilakukan oleh pemerintah pusat dimaksudkan untuk memberikan dampak yang sangat berarti bagi Pertumbuhan Ekonomi daerah. Dengan desentralisasi fiskal yang diundangkan maka daerah dengan PDRB yang besar akan memiliki keleluasaan untuk mengalokasikan dan menentukan sendiri kebutuhan untuk daerah tersebut.

PDRB atau Pertumbuhan Ekonomi adalah proses kenaikan *output* per kapita. Umumnya Pertumbuhan Ekonomi ditujukan untuk peningkatan yang berkelanjutan Produk Domestik Regional Daerah (PDRB). Dengan demikian daerah dengan PDRB yang tinggi dalam satu periode menunjukkan bahwa lokasi tersebut memiliki banyak aktivitas yang menunjang pendapatan daerah seperti misalnya di sektor industri maupun jasa maupun pelayanan publik. Namun demikian infrastruktur yang ada dan menunjang pertumbuhan juga akan mengalami kerusakan. Daerah yang berorientasi pada kelanjutan untuk mendapatkan PDRB yang tinggi akan mempertimbangkan untuk selalu menjaga dan memelihara serta meningkatkan infrastruktur daerahnya. Dengan pertimbangan tersebut maka daerah akan mengalokasikan anggaran belanja yang lebih besar untuk Belanja Modalnya. Hasil ini mendukung dugaan bahwa pemberian otonomi yang lebih besar akan memberikan dampak yang lebih besar bagi pertumbuhan ekonomi, hal inilah yang mendorong daerah untuk mengalokasikan secara lebih efisien berbagai potensi local untuk kepentingan pelayanan publiknya. Hasil penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Farah Marta Yovita dan Dwi Cahyo Utomo (2011) yang hasil penelitiannya menunjukkan bahwa Pertumbuhan Ekonomi mempunyai dampak yang positif dan signifikan terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal .

2. Pengaruh PAD terhadap Pengalokasian anggaran Belanja Modal

Hasil penelitian menunjukkan bahwa PAD memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap Alokasi anggaran belanja modal pada pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah. Hal ini berarti bahwa daerah Kabupaten/Kota yang memiliki PAD yang tinggi akan mengalokasikan Belanja Modal yang tinggi pula. Demikian pula sebaliknya, daerah Kabupaten/Kota yang memiliki PAD yang rendah akan mengalokasikan Belanja Modal yang rendah.

Desentralisasi ditujukan untuk mewujudkan kemandirian daerah, dimana pemerintah daerah otonom mempunyai kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa dan kemampuan sendiri berdasar aspirasi masyarakat (UU 32/2004). Di sisi lain kemampuan daerah untuk menyediakan pendanaan yang berasal dari daerah sangat tergantung pada kemampuan merealisasikan potensi ekonomi tersebut menjadi bentuk-bentuk kegiatan ekonomi yang mampu menciptakan alokasi dana untuk pembangunan daerah yang berkelanjutan.

Di sisi lain, wilayah dengan PAD yang tinggi dapat memiliki tuntutan yang besar dari masyarakatnya untuk semakin dapat memperoleh akses yang besar terhadap pendapatan daerah tersebut. Masyarakat akan semakin banyak yang menyuarakan pada tuntutan perbaikan pelayanan umum. Kondisi demikian dapat mendorong pemerintah daerah dan DPRD untuk menyikapinya sebagai sebuah tuntutan atas pengembalian pendapatan daerah kepada masyarakat sehingga alokasi Belanja Modal semakin besar. Hasil penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Anggiat Situngkir dan John Sihar Manurung (2009) dan Darwanto dan Yulia Yustikasari (2007) yang hasil penelitiannya menunjukkan bahwa penerimaan Pendapatan Asli Daerah mempunyai dampak yang positif dan signifikan terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal.

3. Pengaruh Dana Perimbangan terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dana Perimbangan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap Alokasi anggaran Belanja Modal pada pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah. Hal ini berarti bahwa daerah Kabupaten/Kota yang memiliki Dana Perimbangan yang tinggi akan mengalokasikan belanja modal yang tinggi pula. Demikian pula sebaliknya, daerah Kabupaten/Kota yang memiliki Dana Perimbangan yang rendah akan mengalokasikan Belanja Modal yang rendah.

Dana Perimbangan berasal dari pemerintah pusat berupa dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dan dana bagi hasil yang berasal dari APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan keuangan antar daerah untuk membiayai kebutuhan pengeluarannya didalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Berkaitan dengan perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah, hal tersebut merupakan konsekuensi adanya penyerahan kewenangan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Dengan demikian, terjadi transfer yang cukup signifikan didalam APBN dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah, dan pemerintah daerah secara leluasa dapat menggunakan dana ini apakah untuk memberi pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat atau untuk keperluan lain yang tidak penting.

Semakin besar Dana Perimbangan yang semakin besar yang diberikan oleh pemerintah pusat, maka kontrol terhadap penggunaan dan alokasi dana tersebut juga akan semakin besar dilakukan selain kontrol dari pemerintah daerah juga dilakukan pula control dari pemerintah pusat. Adanya kontrol yang semakin besar tersebut menjadikan penggunaan dana perimbangan juga akan semakin besar untuk dialokasikan untuk pelayanan umum dan perbaikan dan peningkatan infrastruktur daerah. Hasil penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Subowo dan Endar Rosita Wati (2010), yang hasil penelitiannya menunjukkan bahwa Dana Perimbangan mempunyai dampak yang positif dan signifikan terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal.

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Dari hasil analisis maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Terdapat pengaruh positif pertumbuhan ekonomi PDRB terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal Daerah Jawa Tengah, hal ini didukung dengan nilai signifikansi di bawah 0,05. Daerah Kabupateb/Kota yang memiliki PDRB yang tinggi akan mengalokasikan Belanja Modal yang tinggi pula. Demikian pula sebaliknya, daerah Kabupaten/Kota yang memiliki PDRB yang rendah akan mengalokasikan Belanja Modal yang rendah.
2. Terdapat pengaruh positif pendapatan asli daerah (PAD) terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal Daerah Jawa Tengah, hal ini didukung dengan nilai signifikansi di bawah 0,05. Daerah Kabupateb/Kota yang memiliki PAD yang tinggi akan mengalokasikan Belanja Modal yang tinggi pula. Demikian pula sebaliknya, daerah Kabupaten/Kota yang memiliki PAD yang rendah akan mengalokasikan Belanja Modal yang rendah.
3. Terdapat pengaruh positif Dana Perimbangan terhadap Pengalokasian anggaran Belanja Modal Daerah Jawa Tengah, hal ini didukung dengan nilai signifikansi di bawah 0,05. Daerah Kabupateb/Kota yang mendapatkan Dana Perimbangan yang tinggi akan mengalokasikan Belanja Modal yang tinggi pula. Demikian pula sebaliknya, daerah Kabupaten/Kota yang mendapatkan Dana Perimbangan yang rendah akan mengalokasikan Belanja Modal yang rendah.

5.2. Keterbatasan

1. Penelitian memiliki keterbatasan yaitu terdapat perbedaan yang besar pada beberapa data karena berasal dari pengamatan wilayah yang berbeda. Untuk itu analisis selanjutnya dapat menggunakan metode Analisis regresi panel (*panel least square* atau *pool least square*) dengan menambahkan aspek *fixed effect* yang berasal dari masing-masing wilayah dan sekaligus dapat mengetahui wilayah mana yang memiliki pengaruh yang paling besar.

2. Nilai *Adjusted R Square* dalam penelitian ini masih sebesar 56,3 % yang berarti model dapat menjelaskan variasi Belanja Daerah hanya sebesar 56,3 % dan sisanya 43,7 % dijelaskan oleh variabel di luar model.

5.3. Saran

1. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat menganalisis model penelitian dengan menggunakan metode panel atau untuk menunjukkan *fixed effect* yang diperoleh dari perbedaan kondisi PAD, dana perimbangan, pertumbuhan ekonomi maupun belanja modal yang terjadi pada masing-masing wilayah Kabupaten/Kota.
2. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan dapat mengubah model penelitian dengan menambahkan variabel seperti halnya variabel non keuangan. Sebab Darwanto dan Yustikasari (2007) menyatakan bahwa variabel non keuangan seperti kebijakan pemerintah daerah dapat menjelaskan dengan baik seberapa besar tingkat pengadaan modal pembangunan yang seimbang dengan pertumbuhan ekonomi daerah setempat dalam mengutamakan kesejahteraan masyarakat.

5.4. Implikasi Manajerial

Bagi Pemerintah Daerah diharapkan dapat:

1. Mengalokasikan Pertumbuhan Ekonomi PDRB, Pendapatan Asli Daerah, dan Dana Perimbangan untuk anggaran Belanja Modal yang diprioritaskan pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.
2. Mengoptimalkan potensi ekonomi lokalnya untuk menambah penerimaan daerah sehingga tercipta kemandirian daerah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran sehingga pada akhirnya ketergantungan pada pemerintah pusat dapat dikurangi.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggiat Situngkir dan John Sihar Manurung, 2009, *Efek Memiliki Pendapatan Daerah, Pengalokasian Dana Umum, dan Dana Khusus Pada Belanja Modal Di Kota Dan Kabupaten Sumatera Utara*, Jurnal.
- Abdullah, Syukriy dan Abdul Halim. 2006. Studi Atas Belanja Modal Pada Anggaran Pemerintah Daerah Dalam Hubungannya Dengan Belanja Pemeliharaan Dan Sumber Pendapatan. *Jurnal Akuntansi Pemerintah*. Vol.2, No.2 Hal 17-32.
- Arsyad, Lincoln. 2004. *Ekonomi Pembangunan* : edisi kedua, STIE YKPN, Yogyakarta.
- Arikunto, Suharsimi, 2002, *Manajemen Penelitian*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Allen, Richard dan Tommasi, Daniel. 2001. *Managing a Public Expenditure: A Reference Book for Transition Countries*, : OECD Paris.
- Badan Pusat Statistik. 2010. Jakarta-Indonesia.
_____. 2010. "Pedoman Praktis Perhitungan PDRB Kabupaten/Kota : Tata Cara Perhitungan Menurut Penggunaan". Jakarta-Indonesia.
_____. 2011. "Jawa Tengah Dalam Angka 2011". Badan Pusat Statistik Jawa Tengah dan BAPPEDA Provinsi Jawa Tengah.
- Bahl, Ray W. and J. Linn 1998 "Fiscal Decentralization and Intergovernmental Transfer in Less Developed Countries" Publius : The Journal of Federalism Vol 24 winter.
- Burhan, Muhammad, 2011, Suara Merdeka Jum'at, 16 September.
- Boediono, 1992. *Dimensi Ekonomi Politik Pembangunan Indonesia*. Jurnal Keuangan Publik. Vol 5 No. 1 Yogyakarta.
- Darwanto dan Yulia Yustikasari, 2007, *Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dan Dana Alokasi Umum Terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal*, Jurnal.
- FarahMarta Yovita dan Dwi Cahyo Utomo, 2011, *Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal (Studi Empiris pada Pemerintah Propinsi Se Indonesia periode 2008 – 2010)*, SNA XIV, Banda Aceh.
- Halim, Abdul. 2004. *Akuntansi Keuangan Daerah*. Salemba Empat. Jakarta.

- Keefter, Philip and Khemani, Democracy, Public Expenditures, and the Poor. 2003. *Word Bank Policy Research Working Paper 3164*.
- Kuncoro, Mudrajat. 2004. *Otonomi dan Pembangunan Daerah: Reformasi, Perekonomian, Strategi dan Peluang*. Penerbit Erlangga.
- Lewis, Blane D and Andre Oosterman. 2003. The Impact of Decentralization on Subnational Government Fiscal Slack Indonesia. *Journal Accounting, Public Budgeting & Finance*.
- Lin, Justin Yifu dan Zhiqiang Liu. 2000. *Fiscal Desentralization and Economic Growth in China*. Economic Development and Cultural Change Chicago. Vol. 49.
- Mardiasmo, 2002, *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*, Yogyakarta, Penerbit Andi Offset.
- Majidi, N. 1997. *Anggaran Pembangunan dan Ketimpangan Ekonomi Antar Daerah*. Prisma. LP3ES. Vol. 3. Hal : 3-2
- Nugroho Suratno Putro, 2009, *Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal (Study Kasus Pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah)*, Jurnal.
- Runiasari, 2011, Kartika, Suara Merdeka Selasa, 06 September.
- Rubin, Irene S. 1993. *The Politics of Public Budgeting: Getting and Spending, Borrowing and Balancing*. Second edition. Chatam, NJ: Chatham House Publishers, Inc.
- Saragih, JP, 2003. *Desentralisasi Fiskal dan Keuangan Daerah dalam Otonomi*. Penerbit Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Setiawan, E, 2004, *Metode Penelitian Bisnis*, STIE Widyamanggal Semarang.
- Suryasubrata, 2000, *Teknik Pembuatan Tesis, Disertasi dan Karya Ilmiah*, Rajawali Grafindo, Jakarta
- Soekarwo, 2003, *Berbagai Permasalahan Keuangan Daerah*, Grafindo, Jakarta.
- Sukirno, Sudono, 1994. *Ekonomi Pembangunan*, FEUI dan Bina Grafika, Jakarta.
- Simanjuntak, Robert. 2005. *Kebijakan Pungutan Daerah di Era Otonomi, Domestic Trade, Decentralization and Globalization: A One Day Conference*. LPEM-UI. Jakarta.

Todaro, Michael, P. 2000. *Pembangunan Ekonomi dan Pemerataan Pendapatan*. LP3ES, Jakarta.

Wong, John D. 2004. The Fiscal Impact of Economic Growth and Development on Local Government Capacity, *Journal of Public Budgeting, Accounting and Financial Management*. Fall.

www.djpk.depkeu.go.id

Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara*.

....., *Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah*.

....., *Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah*.

....., *Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah*.

....., *Peraturan Pemerintah Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah*.

....., *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2009*.

LAMPIRAN

STIE BPD Jateng

Lampiran 1
Data Variabel PE Pemerintah Daerah (Dalam Persentase)

NO	DAERAH	Tahun		
		2008	2009	2010
1	Kab. Banjarnegara	4,9765	5,1125	4,887128938
2	Kab. Banyumas	5,3762	5,4914	5,774101843
3	Kab. Batang	3,6733	3,7220	4,970441392
4	Kab. Blora	5,6240	5,0761	5,194729207
5	Kab. Boyolali	4,0359	5,1585	3,597786882
6	Kab. Brebes	4,8097	4,9889	4,94493851
7	Kab. Cilacap	4,9210	5,2508	5,569996349
8	Kab. Demak	4,1144	4,0763	4,124897634
9	Kab. Grobogan	5,3253	5,0292	5,046839
10	Kab. Jepara	4,4944	5,0244	4,523836213
11	Kab. Karanganyar	5,2994	5,5416	5,416717427
12	Kab. Kebumen	5,8004	3,9372	4,151873663
13	Kab. Kendal	4,2319	5,5817	5,946209591
14	Kab. Klaten	3,9255	4,2437	1,727122192
15	Kab. Kudus	3,9237	3,9468	4,161043734
16	Kab. Magelang	4,1517	5,5576	4,509672561
17	Kab. Pati	4,9424	4,6866	5,111341477
18	Kab. Pekalongan	4,7811	4,3046	4,269744595
19	Kab. Pemasang	4,9949	4,7807	4,635729195
20	Kab. Purbalingga	5,3013	5,8852	5,674237762
21	Kab. Purworejo	5,6164	4,9555	5,008244458
22	Kab. Rembang	4,6732	4,4580	4,446315797
23	Kab. Semarang	4,2607	4,3654	4,901755287
24	Kab. Sragen	5,6905	6,0077	6,063275779
25	Kab. Sukoharjo	4,8432	4,7602	4,653465359
26	Kab. Tegal	5,3156	5,2908	4,828330807
27	Kab. Temanggung	3,5430	4,0865	4,309597377
28	Kab. Wonogiri	4,2666	4,7336	3,143698622
29	Kab. Wonosobo	3,6923	4,0171	4,291089644
30	Kota Magelang	5,0495	5,1130	6,121996392
31	Kota Pekalongan	3,7282	4,7794	5,512001334
32	Kota Salatiga	4,9799	4,4821	5,010857459
33	Kota Semarang	5,5900	5,3441	5,873170991
34	Kota Surakarta	5,6933	5,9027	5,936402748
35	Kota Tegal	5,1512	5,0158	4,605827509

Lampiran 2
Data Variabel PE Pemerintah Daerah (Dalam Rupiah)

NO	DAERAH	Tahun		
		2008	2009	2010
1	Kab. Banjarnegara	2.619.989.610.000	2.753.935.730.000	2.888.524.120.000
2	Kab. Banyumas	4.171.468.950.000	4.400.542.230.000	4.654.634.020.000
3	Kab. Batang	2.169.854.550.000	2.250.616.820.000	2.362.482.410.000
4	Kab. Blora	1.913.763.350.000	2.010.908.670.000	2.115.369.930.000
5	Kab. Boyolali	3.899.372.860.000	4.100.520.260.000	4.248.048.240.000
6	Kab. Brebes	4.998.528.190.000	5.247.897.410.000	5.507.402.710.000
7	Kab. Cilacap	10.689.092.900.000	12.302.859.950.000	12.988.128.800.000
8	Kab. Demak	2.787.524.020.000	2.901.151.510.000	3.020.821.040.000
9	Kab. Grobogan	2.948.793.800.000	3.097.093.250.000	3.253.398.560.000
10	Kab. Jepara	3.889.988.850.000	4.085.438.360.000	4.270.256.900.000
11	Kab. Karanganyar	4.900.690.400.000	5.172.268.330.000	5.452.435.490.000
12	Kab. Kebumen	2.721.254.090.000	2.828.395.070.000	2.945.826.460.000
13	Kab. Kendal	4.821.181.520.000	5.090.286.600.000	5.392.965.710.000
14	Kab. Klaten	4.567.200.960.000	4.761.018.670.000	4.843.247.280.000
15	Kab. Kudus	11.683.819.730.000	12.144.952.380.000	12.650.309.160.000
16	Kab. Magelang	3.731.388.590.000	3.938.764.680.000	4.116.390.070.000
17	Kab. Pati	4.162.082.370.000	4.357.144.030.000	4.579.852.540.000
18	Kab. Pekalongan	2.970.214.980.000	3.098.071.490.000	3.230.351.230.000
19	Kab. Pemalang	3.142.808.700.000	3.293.056.250.000	3.445.713.420.000
20	Kab. Purbalingga	2.257.392.770.000	2.390.244.570.000	2.525.872.730.000
21	Kab. Purworejo	2.737.087.130.000	2.872.723.790.000	3.016.596.820.000
22	Kab. Rembang	2.093.412.590.000	2.186.736.490.000	2.283.965.700.000
23	Kab. Semarang	5.079.003.740.000	5.300.723.410.000	5.560.551.900.000
24	Kab. Sragen	2.729.450.320.000	2.893.427.190.000	3.068.863.660.000
25	Kab. Sukoharjo	4.540.751.530.000	4.756.902.500.000	4.978.263.310.000
26	Kab. Tegal	3.286.263.440.000	3.460.131.600.000	3.627.198.200.000
27	Kab. Temanggung	2.219.155.630.000	2.309.841.530.000	2.409.386.400.000
28	Kab. Wonogiri	2.770.435.780.000	2.901.577.440.000	2.992.794.290.000
29	Kab. Wonosobo	1.741.148.310.000	1.811.092.670.000	1.888.808.280.000
30	Kota Magelang	993.835.200.000	1.044.650.240.000	1.108.603.690.000
31	Kota Pekalongan	1.887.853.700.000	1.978.082.250.000	2.087.114.170.000
32	Kota Salatiga	832.154.880.000	869.452.990.000	913.020.040.000
33	Kota Semarang	17.156.814.290.000	20.180.577.950.000	21.365.817.800.000
34	Kota Surakarta	4.549.342.950.000	4.817.877.630.000	5.103.886.250.000
35	Kota Tegal	1.166.587.870.000	1.225.102.110.000	1.281.528.200.000

Lampiran 3
Data Variabel PAD Pemerintah Daerah (Dalam Rupiah)

NO	DAERAH	Tahun		
		2008	2009	2010
1	Kab. Banjarnegara	46.528.340.000	49.599.390.000	60.036.077.000
2	Kab. Banyumas	107.425.765.000	141.413.858.000	65.364.093.000
3	Kab. Batang	41.192.714.000	36.517.563.000	44.570.205.000
4	Kab. Blora	50.203.193.000	50.000.000.000	56.500.000.000
5	Kab. Boyolali	63.733.408.000	62.787.013.000	80.020.241.000
6	Kab. Brebes	71.896.767.000	65.081.383.000	70.466.896.000
7	Kab. Cilacap	182.780.342.000	100.784.000.000	126.058.245.000
8	Kab. Demak	43.817.065.000	41.865.674.000	54.560.293.000
9	Kab. Grobogan	59.922.461.000	45.890.617.000	56.175.738.000
10	Kab. Jepara	70.427.234.000	72.717.676.000	71.081.298.000
11	Kab. Karanganyar	64.470.676.000	64.017.107.000	73.976.841.000
12	Kab. Kebumen	58.599.425.000	61.130.149.000	67.981.056.000
13	Kab. Kendal	71.684.588.000	62.627.065.000	75.773.781.000
14	Kab. Klaten	49.549.622.000	66.073.046.000	71.371.000.000
15	Kab. Kudus	71.520.068.000	71.404.840.000	92.294.396.000
16	Kab. Magelang	81.203.386.000	69.554.510.000	50.085.652.000
17	Kab. Pati	89.677.766.000	70.623.590.000	92.113.750.000
18	Kab. Pekalongan	50.136.941.000	48.132.168.000	55.967.925.000
19	Kab. Pemalang	66.737.480.000	53.658.695.000	61.498.796.000
20	Kab. Purbalingga	63.795.293.000	68.865.789.000	68.143.472.000
21	Kab. Purworejo	51.174.861.000	47.480.960.000	60.989.102.000
22	Kab. Rembang	51.150.558.000	56.754.633.000	78.227.428.000
23	Kab. Semarang	89.242.881.000	90.188.374.000	97.181.797.000
24	Kab. Sragen	65.561.026.000	57.450.017.000	69.398.245.000
25	Kab. Sukoharjo	41.898.319.000	45.132.000.000	60.373.433.000
26	Kab. Tegal	59.370.632.000	67.132.953.000	74.304.065.000
27	Kab. Temanggung	37.773.970.000	39.993.148.000	55.095.179.000
28	Kab. Wonogiri	54.129.295.000	60.942.584.000	64.818.342.000
29	Kab. Wonosobo	38.158.244.000	45.003.352.000	60.647.867.000
30	Kota Magelang	40.549.584.000	49.373.992.000	78.651.454.000
31	Kota Pekalongan	30.098.049.000	22.544.920.000	55.967.925.000
32	Kota Salatiga	45.149.902.000	38.991.171.000	51.590.175.000
33	Kota Semarang	267.914.251.000	259.411.089.000	293.826.726.000
34	Kota Surakarta	102.929.502.000	106.759.419.000	120.183.277.000
35	Kota Tegal	69.567.244.000	65.268.799.000	74.304.065.000

Lampiran 4
Data Variabel DP Pemerintah Daerah (Dalam Rupiah)

NO	DAERAH	Tahun		
		2008	2009	2010
1	Kab. Banjarnegara	142.493.351.000	154.712.328.000	156.908.479.000
2	Kab. Banyumas	168.650.599.000	207.598.137.000	194.377.767.000
3	Kab. Batang	123.109.714.000	159.348.941.000	116.960.335.000
4	Kab. Blora	187.933.193.000	184.533.966.000	223.510.443.000
5	Kab. Boyolali	150.228.988.000	173.341.383.000	174.490.885.000
6	Kab. Brebes	123.844.767.000	155.674.470.000	186.887.463.000
7	Kab. Cilacap	250.056.276.000	260.054.189.907	308.602.645.000
8	Kab. Demak	142.542.434.000	161.077.909.000	156.680.199.000
9	Kab. Grobogan	122.894.998.000	126.616.907.000	174.144.960.000
10	Kab. Jepara	172.773.358.000	197.143.171.000	187.310.793.000
11	Kab. Karanganyar	154.094.017.000	180.555.248.000	163.368.712.000
12	Kab. Kebumen	154.939.984.000	173.113.105.000	167.458.940.000
13	Kab. Kendal	168.420.522.000	191.494.769.000	193.803.109.000
14	Kab. Klaten	146.401.141.000	180.953.889.000	188.508.174.000
15	Kab. Kudus	180.313.068.000	199.334.860.000	252.357.336.000
16	Kab. Magelang	167.019.396.000	195.634.083.000	91.304.568.000
17	Kab. Pati	187.143.872.000	202.128.371.000	205.655.084.000
18	Kab. Pekalongan	134.283.823.000	140.537.806.000	156.627.143.000
19	Kab. Pemalang	106.469.780.000	105.205.443.000	159.259.110.000
20	Kab. Purbalingga	138.443.870.000	184.564.312.000	155.128.139.000
21	Kab. Purworejo	138.114.296.000	154.894.565.000	154.170.647.000
22	Kab. Rembang	150.478.621.000	151.214.132.000	164.372.903.000
23	Kab. Semarang	197.349.751.000	200.620.022.000	196.823.286.000
24	Kab. Sragen	151.109.085.000	141.743.833.000	157.707.100.000
25	Kab. Sukoharjo	124.663.140.000	151.540.741.000	164.080.686.000
26	Kab. Tegal	124.362.072.000	158.953.974.000	187.285.553.000
27	Kab. Temanggung	112.216.170.000	124.952.722.000	125.642.548.000
28	Kab. Wonogiri	155.649.847.000	169.903.799.000	177.573.802.000
29	Kab. Wonosobo	126.303.282.000	152.565.569.000	163.981.456.000
30	Kota Magelang	85.549.657.000	100.080.722.000	226.084.459.000
31	Kota Pekalongan	87.198.859.000	92.990.558.000	156.627.143.000
32	Kota Salatiga	97.132.690.000	95.869.967.000	96.034.344.000
33	Kota Semarang	238.150.937.000	458.352.408.000	454.117.150.000
34	Kota Surakarta	190.889.502.000	219.613.137.000	223.791.809.000
35	Kota Tegal	123.911.244.000	118.689.820.000	148.601.765.971

Lampiran 5

Data Variabel DAU Pemerintah Daerah (Dalam Rupiah)

NO	DAERAH	Tahun		
		2008	2009	2010
1	Kab. Banjarnegara	488.707.563.000	504.765.000.000	500.783.177.000
2	Kab. Banyumas	702.152.351.000	735.160.880.000	720.191.173.000
3	Kab. Batang	401.574.876.000	416.413.440.000	414.499.766.000
4	Kab. Blora	478.260.120.000	487.316.394.000	487.917.464.000
5	Kab. Boyolali	582.512.206.000	586.021.039.000	587.574.192.000
6	Kab. Brebes	716.426.000.000	716.602.860.000	738.270.368.000
7	Kab. Cilacap	773.078.652.000	782.157.000.000	793.266.735.000
8	Kab. Demak	483.239.311.000	484.814.489.000	493.497.333.000
9	Kab. Grobogan	615.030.004.000	614.891.166.000	617.827.183.000
10	Kab. Jepara	505.641.495.000	522.070.110.000	529.580.873.000
11	Kab. Karanganyar	506.156.445.000	517.670.406.000	520.919.106.000
12	Kab. Kebumen	616.395.049.000	638.804.310.000	642.797.600.000
13	Kab. Kendal	490.895.234.000	512.809.060.000	520.676.886.000
14	Kab. Klaten	744.676.781.000	726.192.262.000	726.234.465.000
15	Kab. Kudus	460.540.680.000	471.869.492.000	463.012.580.000
16	Kab. Magelang	588.001.786.000	596.437.825.000	260.112.799.000
17	Kab. Pati	603.264.393.000	621.169.150.000	620.576.636.000
18	Kab. Pekalongan	465.324.091.000	475.256.250.000	490.093.078.000
19	Kab. Pemalang	577.864.687.000	577.864.687.000	619.895.592.000
20	Kab. Purbalingga	458.204.824.000	462.110.000.000	464.789.000.000
21	Kab. Purworejo	515.796.414.000	526.630.040.000	528.061.281.000
22	Kab. Rembang	398.410.703.000	407.158.671.000	411.434.996.000
23	Kab. Semarang	491.166.076.000	508.704.917.000	508.915.019.000
24	Kab. Sragen	551.265.965.000	551.913.436.000	561.675.090.000
25	Kab. Sukoharjo	498.935.688.000	509.732.760.000	516.588.000.000
26	Kab. Tegal	606.452.130.000	624.991.570.000	640.042.082.000
27	Kab. Temanggung	421.056.329.000	430.276.350.000	438.090.923.000
28	Kab. Wonogiri	598.932.854.000	614.599.465.000	616.996.009.000
29	Kab. Wonosobo	427.667.185.000	431.742.990.000	442.370.077.000
30	Kota Magelang	256.525.338.000	256.733.670.000	604.521.811.000
31	Kota Pekalongan	264.051.790.000	265.366.270.000	490.093.078.000
32	Kota Salatiga	225.384.715.000	236.695.720.000	238.069.009.000
33	Kota Semarang	634.864.459.000	687.629.207.000	640.186.272.000
34	Kota Surakarta	420.911.721.000	435.470.810.000	428.248.927.000
35	Kota Tegal	236.194.340.000	241.785.257.000	640.042.082.000

Lampiran 6
Data Variabel DAK Pemerintah Daerah (Dalam Rupiah)

NO	DAERAH	Tahun		
		2008	2009	2010
1	Kab. Banjarnegara	58.868.000.000	65.961.000.000	60.953.553.000
2	Kab. Banyumas	10.146.000.000	37.630.000.000	76.326.300.000
3	Kab. Batang	55.568.000.000	68.377.000.000	46.451.400.000
4	Kab. Blora	56.700.000.000	52.242.000.000	82.515.300.000
5	Kab. Boyolali	54.087.000.000	69.901.000.000	55.663.700.000
6	Kab. Brebes	10.334.000.000	39.229.000.000	66.824.200.000
7	Kab. Cilacap	78.898.000.000	75.014.000.000	100.844.400.000
8	Kab. Demak	63.555.000.000	71.896.000.000	56.535.200.000
9	Kab. Grobogan	19.977.500.000	26.808.000.000	67.472.400.000
10	Kab. Jepara	61.272.000.000	76.104.000.000	64.454.400.000
11	Kab. Karanganyar	54.898.000.000	68.096.000.000	55.095.100.000
12	Kab. Kebumen	66.405.000.000	74.226.000.000	65.818.900.000
13	Kab. Kendal	59.995.000.000	74.895.000.000	58.544.700.000
14	Kab. Klaten	62.798.000.000	71.995.000.000	70.542.300.000
15	Kab. Kudus	47.293.000.000	59.851.000.000	30.502.200.000
16	Kab. Magelang	48.654.000.000	80.652.000.000	17.730.100.000
17	Kab. Pati	66.068.000.000	75.860.000.000	66.729.600.000
18	Kab. Pekalongan	58.600.000.000	60.665.000.000	63.845.500.000
19	Kab. Pemasang	9.932.300.000	9.871.000.000	61.660.200.000
20	Kab. Purbalingga	51.047.000.000	76.593.050.000	44.809.000.000
21	Kab. Purworejo	56.743.000.000	68.762.000.000	56.527.500.000
22	Kab. Rembang	51.071.000.000	56.633.000.000	48.878.400.000
23	Kab. Semarang	57.838.000.000	65.057.000.000	51.310.300.000
24	Kab. Sragen	54.287.000.000	48.158.000.000	51.644.800.000
25	Kab. Sukoharjo	50.547.000.000	63.107.000.000	49.452.900.000
26	Kab. Tegal	28.476.000.000	46.276.000.000	59.002.900.000
27	Kab. Temanggung	48.148.000.000	51.185.000.000	46.794.100.000
28	Kab. Wonogiri	70.627.000.000	70.354.000.000	72.347.900.000
29	Kab. Wonosobo	57.280.000.000	67.019.000.000	55.332.700.000
30	Kota Magelang	27.950.000.000	29.932.000.000	100.912.400.000
31	Kota Pekalongan	35.145.000.000	38.705.000.000	63.845.500.000
32	Kota Salatiga	31.028.000.000	32.044.000.000	21.182.300.000
33	Kota Semarang	21.141.000.000	41.803.000.000	30.292.200.000
34	Kota Surakarta	31.007.000.000	38.765.000.000	29.118.400.000
35	Kota Tegal	31.499.000.000	37.876.000.000	24.698.700.000

Lampiran 7
Data Variabel DBH Pemerintah Daerah (Dalam Rupiah)

NO	DAERAH	Tahun		
		2008	2009	2010
1	Kab. Banjarnegara	37.097.011.000	39.151.938.000	35.918.849.000
2	Kab. Banyumas	51.078.834.000	68.554.279.000	52.687.374.000
3	Kab. Batang	26.349.000.000	54.454.378.000	25.938.730.000
4	Kab. Blora	81.030.000.000	82.291.966.000	84.495.143.000
5	Kab. Boyolali	32.408.580.000	40.653.370.000	38.806.944.000
6	Kab. Brebes	41.614.000.000	51.364.087.000	49.596.367.000
7	Kab. Cilacap	68.377.934.000	84.256.189.907	81.700.000.000
8	Kab. Demak	35.170.369.000	47.316.235.000	45.584.706.000
9	Kab. Grobogan	42.995.037.000	53.918.290.000	50.496.822.000
10	Kab. Jepara	41.074.124.000	48.321.495.000	51.775.095.000
11	Kab. Karanganyar	34.725.341.000	48.442.141.000	34.296.771.000
12	Kab. Kebumen	29.935.559.000	37.756.956.000	33.658.984.000
13	Kab. Kendal	36.740.934.000	53.972.704.000	59.484.628.000
14	Kab. Klaten	34.053.519.000	42.885.843.000	46.594.874.000
15	Kab. Kudus	61.500.000.000	68.079.020.000	129.560.740.000
16	Kab. Magelang	37.162.010.000	45.427.573.000	23.488.816.000
17	Kab. Pati	40.398.106.000	55.644.781.000	46.811.734.000
18	Kab. Pekalongan	25.546.882.000	31.740.638.000	36.813.718.000
19	Kab. Pemalang	29.800.000.000	41.675.748.000	36.100.114.000
20	Kab. Purbalingga	23.601.577.000	39.105.473.000	42.175.667.000
21	Kab. Purworejo	30.196.435.000	38.651.605.000	36.654.045.000
22	Kab. Rembang	48.257.063.000	37.826.499.000	37.267.075.000
23	Kab. Semarang	36.568.870.000	45.374.648.000	48.331.189.000
24	Kab. Sragen	31.261.059.000	36.135.816.000	36.664.055.000
25	Kab. Sukoharjo	32.217.821.000	43.301.741.000	54.254.353.000
26	Kab. Tegal	36.515.440.000	45.545.021.000	53.978.588.000
27	Kab. Temanggung	26.294.200.000	33.774.574.000	23.753.269.000
28	Kab. Wonogiri	30.893.552.000	38.607.215.000	40.407.560.000
29	Kab. Wonosobo	30.865.038.000	40.543.217.000	48.000.889.000
30	Kota Magelang	17.050.073.000	20.774.730.000	46.520.605.000
31	Kota Pekalongan	21.955.810.000	31.740.638.000	36.813.718.000
32	Kota Salatiga	20.954.788.000	24.834.796.000	23.261.869.000
33	Kota Semarang	139.095.686.000	257.138.319.000	219.998.224.000
34	Kota Surakarta	56.953.000.000	74.088.718.000	74.490.132.000
35	Kota Tegal	22.845.000.000	45.545.021.000	49.599.000.971

Lampiran 8
Data Variabel BM Pemerintah Daerah (Dalam Rupiah)

NO	DAERAH	Tahun		
		2008	2009	2010
1	Kab. Banjarnegara	138.287.451.000	102.463.952.000	72.453.773.000
2	Kab. Banyumas	154.241.121.000	174.008.904.000	77.956.589.000
3	Kab. Batang	109.144.413.000	74.858.839.000	47.887.670.000
4	Kab. Blora	141.454.932.000	129.823.827.000	75.677.718.000
5	Kab. Boyolali	124.533.005.000	136.724.606.000	99.357.644.000
6	Kab. Brebes	115.181.836.000	105.544.493.000	136.444.903.000
7	Kab. Cilacap	227.042.484.000	160.851.000.000	221.349.237.000
8	Kab. Demak	112.693.549.000	107.127.146.000	90.283.909.000
9	Kab. Grobogan	103.632.379.000	106.559.974.000	84.889.943.000
10	Kab. Jepara	126.369.601.000	128.008.626.000	77.515.946.000
11	Kab. Karanganyar	149.886.536.000	100.288.589.000	53.705.709.000
12	Kab. Kebumen	106.041.447.000	114.751.552.000	72.453.773.000
13	Kab. Kendal	116.591.446.000	96.243.411.000	96.394.084.000
14	Kab. Klaten	124.478.227.000	95.194.885.000	82.722.797.000
15	Kab. Kudus	115.755.905.000	182.398.616.000	190.783.565.000
16	Kab. Magelang	121.809.610.000	117.793.994.000	43.936.652.000
17	Kab. Pati	126.413.282.000	155.703.754.000	113.308.329.000
18	Kab. Pekalongan	96.564.162.000	102.119.818.000	74.334.694.000
19	Kab. Pemalang	105.099.803.000	81.212.592.000	85.694.759.000
20	Kab. Purbalingga	108.386.711.000	134.847.923.000	68.333.341.000
21	Kab. Purworejo	106.615.079.000	93.299.528.000	72.936.286.000
22	Kab. Rembang	123.254.537.000	88.623.219.000	93.192.556.000
23	Kab. Semarang	146.116.607.000	124.183.050.000	96.081.052.000
24	Kab. Sragen	107.554.065.000	97.170.742.000	74.778.646.000
25	Kab. Sukoharjo	112.595.425.000	92.436.727.000	84.402.082.000
26	Kab. Tegal	119.884.274.000	117.083.434.000	96.233.213.000
27	Kab. Temanggung	119.137.750.000	88.563.405.000	84.516.584.000
28	Kab. Wonogiri	144.349.169.000	130.187.612.000	79.854.156.000
29	Kab. Wonosobo	106.949.520.000	132.165.684.000	45.735.797.000
30	Kota Magelang	72.451.726.000	95.838.701.000	93.497.104.000
31	Kota Pekalongan	104.148.893.000	70.555.137.000	74.334.694.000
32	Kota Salatiga	106.481.274.000	102.756.936.000	33.876.627.000
33	Kota Semarang	195.065.661.000	274.529.979.000	234.957.212.000
34	Kota Surakarta	146.614.676.000	180.399.019.000	183.197.639.000
35	Kota Tegal	94.109.843.000	128.880.456.000	96.233.213.000

Lampiran 9
Data Mentah (Raw Data) Lampiran

PDRB	PAD	DP	BM	res_1	ARES
2620	47	142	138	4158264	41582642951.85
2754	50	155	102	231642	2316415754.01
2889	60	157	72	-3121893	31218925249.61
4171	107	169	154	3207345	32073446178.64
4401	141	208	174	3526331	35263307311.36
4655	65	194	78	-3959000	39590000802.56
2170	41	123	109	1878719	18787188105.17
2251	37	159	75	-2113238	21132383346.33
2362	45	117	48	-4284568	42845684821.66
1914	50	188	141	3783008	37830083266.80
2011	50	185	130	2655521	26555211368.27
2115	57	224	76	-3668112	36681123963.56
3899	64	150	125	1785875	17858746912.99
4101	63	173	137	2544944	25449439005.41
4248	80	174	99	-1704768	17047675387.66
4999	72	124	115	764666	7646656160.99
5248	65	156	106	-681583	6815830651.21
5507	70	187	136	1619128	16191284691.94
10689	183	250	227	4963339	49633387881.60
12303	101	260	161	-242617	2426169250.42
12988	126	309	221	4052745	40527445806.70
2788	44	143	113	1613887	16138866788.08
2901	42	161	107	734408	7344083377.27
3021	55	157	90	-1236150	12361496069.01
2949	60	123	104	597002	5970020235.13
3097	46	127	107	1136328	11363281721.01
3253	56	174	85	-2209324	22093243391.99
3890	70	173	126	1390571	13905708849.02
4085	73	197	128	989891	9898912451.22
4270	71	187	78	-3898262	38982617986.92
4901	64	154	150	3909061	39090613590.44
5172	64	181	100	-1607056	16070557408.91
5452	74	163	54	-6300604	63006037328.98
2721	59	155	106	363628	3636282605.52
2828	61	173	115	804848	8048481130.67
2946	68	167	72	-3536882	35368817954.97
4821	72	168	117	158993	1589933742.83
5090	63	191	96	-2147888	21478879940.84
5393	76	194	96	-2611501	26115011091.97

4567	50	146	124	2000381	20003814772.12
4761	66	181	95	-2044052	20440517825.75
4843	71	189	83	-3591607	35916073033.21
11684	72	180	116	-2349777	23497768181.84
12145	71	199	182	3823372	38233722055.83
12650	92	252	191	2997316	29973163084.09
3731	81	167	122	812207	8122072974.21
3939	70	196	118	124735	1247354919.31
4116	50	91	44	-4921871	49218709115.00
4162	90	187	126	549667	5496669938.58
4357	71	202	156	3635276	36352755044.51
4580	92	206	113	-1294507	12945066160.81
2970	50	134	97	-71069	710687627.88
3098	48	141	102	381427	3814269960.56
3230	56	157	74	-2934004	29340039328.22
3143	67	106	105	803574	8035736385.32
3293	54	105	81	-1273265	12732654883.78
3446	61	159	86	-2057926	20579260479.02
2257	64	138	108	913237	9132374662.64
2390	69	185	135	2548351	25483505094.69
2526	68	155	68	-3593783	35937829544.49
2737	51	138	107	912898	9128979251.70
2873	47	155	93	-671776	6717760773.83
3017	61	154	73	-3089828	30898282842.19
2093	51	150	123	2560603	25606030298.84
2187	57	151	89	-1090551	10905506715.37
2284	78	164	93	-1457813	14578133483.94
5079	89	197	146	2050169	20501692641.77
5301	90	201	124	-298467	2984670852.56
5561	97	197	96	-3303949	33039486244.15
2729	66	151	108	402213	4022133620.91
2893	57	142	97	-309739	3097386165.67
3069	69	158	75	-3203586	32035861043.49
4541	42	125	113	1412682	14126821692.80
4757	45	152	92	-1244310	12443104217.71
4978	60	164	84	-2740026	27400261727.00
3286	59	124	120	2100940	21009402376.22
3460	67	159	117	936488	9364883528.82
3627	74	187	96	-1901795	19017952019.98
2219	38	112	119	3148124	31481240342.36
2310	40	125	89	-227051	2270512580.62
2409	55	126	85	-1065948	10659480685.91

2770	54	156	144	4280963	42809632666.93
2902	61	170	130	2387955	23879553389.00
2993	65	178	80	-2914049	29140491629.01
1741	38	126	107	1817806	18178058888.82
1811	45	153	132	3663467	36634671063.14
1889	61	164	46	-5615430	56154301138.58
994	41	86	72	-712701	7127006931.08
1045	49	100	96	1118142	11181424966.48
1109	79	226	93	-2179609	21796090268.05
1888	30	87	104	2408323	24083229328.14
1978	23	93	71	-890463	8904633373.39
2087	56	157	74	-2565253	25652532925.36
832	45	97	106	2413432	24134315343.05
869	39	96	103	2210768	22107678129.04
913	52	96	34	-5019312	50193124372.34
17157	268	238	195	-2300525	23005248589.54
20181	259	458	275	892006	8920059634.76
21366	294	454	235	-4258484	42584837460.60
4549	103	191	147	2035040	20350399002.48
4818	107	220	180	4706558	47065578784.44
5104	120	224	183	4472010	44720097501.32
1167	70	124	94	-47656	476559172.11
1225	65	119	129	3616217	36162165176.62
1282	74	149	96	-442864	4428640367.37

STIEBER

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Achmad Asrorri
Tempat/tanggal lahir : Semarang, 14 september 1990
Alamat : Jl. Parang Baris II/16 , Tlogosari Semarang
Status : Belum Menikah
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Nomor HP : 085640824011

Pendidikan Formal

2008-2012 : STIE Bank BPD Jateng, Semarang
2005-2008 : SMA Islam Sultan Agung 1, Semarang
2002-2005 : SMP Negeri 15 Semarang
1996-2002 : SD Negeri Tlogosari Kulon 04, Semarang

Lampiran 10
Output Hasil Penelitian

A. Analisis Deskriptif

Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Belanja Modal	105	33876627000	274529979000	112966175476.19	40372921816.519
PDRB	105	832154880000	21365817800000	4227068610761.91	3582083703544.224
PAD	105	22544920000	293826726000	71378487914.29	41759718495.110
Dana Perimbangan	105	85549657000	458352408000	168199852351.22	56414613083.543
Valid N (listwise)	105				

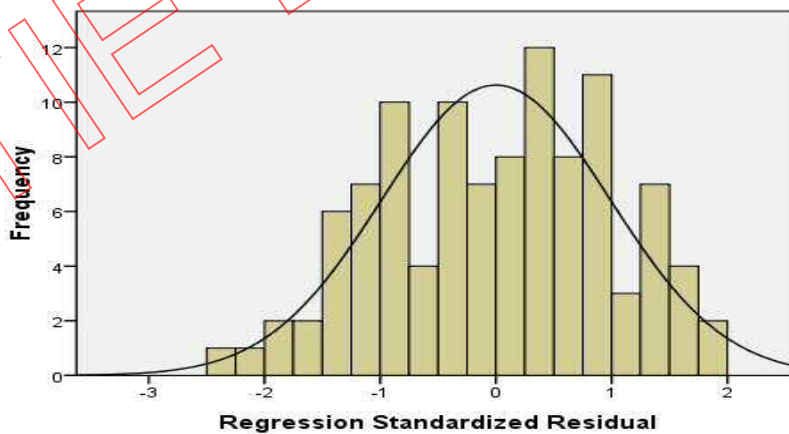
B. Uji Asumsi Klasik

Uji Normalitas

a. Grafik Histogram

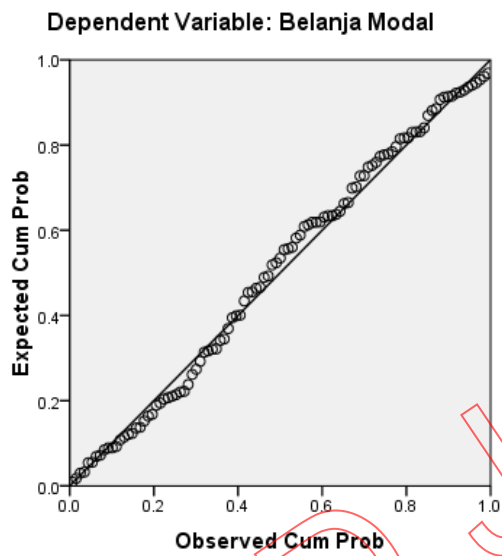
Histogram

Dependent Variable: Belanja Modal



b. Grafik Probability plot

Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual



c. Uji Kormogolov Smirnov

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		105
Normal Parameters ^a	Mean	.0000050
	Std. Deviation	2.62950466E10
Most Extreme Differences	Absolute	.058
	Positive	.058
	Negative	-.058
Kolmogorov-Smirnov Z		.591
Asymp. Sig. (2-tailed)		.875
a. Test distribution is Normal.		

Uji Multikolinieritas

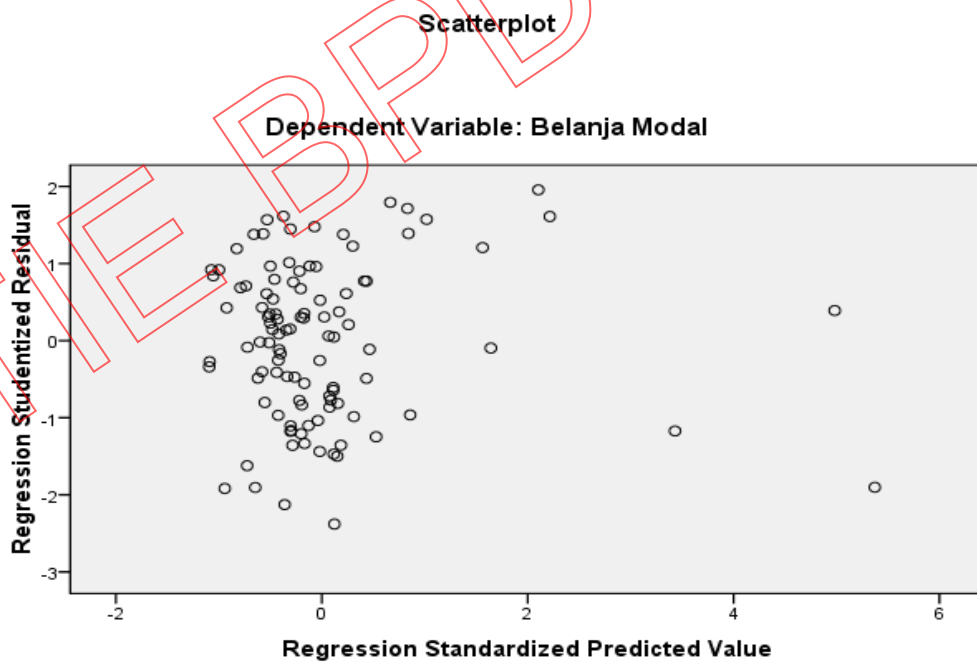
Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Coefficients			Tolerance	VIF
	Beta						
1 (Constant)	50380426422.300	1.005E10		5.013	.000		
PDRB	.003	.001	.286	2.213	.029	.251	3.983
PAD	.258	.128	.267	2.014	.047	.239	4.178
Dana Perimbangan	.182	.090	.254	2.006	.047	.263	3.807

a. Dependent Variable: Belanja Modal

Uji Heteroskedastisitas

a. Grafik Scatterplot



b. Uji Glejser

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	1.375E10	5.398E9		2.546	.012
	PDRB	.000	.001	-.087	-.444	.658
	PAD	.037	.069	.108	.543	.588
	Dana Perimbangan	.041	.049	.162	.852	.396

a. Dependent Variable: Ares

Uji Model

Coefficients^a

Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
50380426422.300	1.005E10		5.013	.000		
.003	.001	.286	2.213	.029	.251	3.983
.258	.128	.267	2.014	.047	.239	4.178
.182	.090	.254	2.006	.047	.263	3.807

a. Dependent Variable: Belanja Modal